

**UPAYA ARAB SAUDI TERHADAP ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAN DAN ARAB SAUDI TAHUN
2013-2018**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

EMIL HIKMAWAN

14323020

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2018

**UPAYA ARAB SAUDI TERHADAP ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAN DAN ARAB SAUDI TAHUN
2013-2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

EMIL HIKMAWAN

14323020

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA ARAB SAUDI TERHADAP ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAN DAN ARAB SAUDI TAHUN
2013-2018

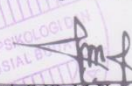
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
14 Agustus 2018

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

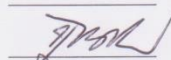
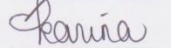

Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

1. Gustrieni Putri, S.IP., M.A
2. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A
3. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A

Tanda Tangan



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Emil Hikmawan

No. Mahasiswa : 14323020

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Arab Saudi Terhadap Organisasi Kerjasama Islam Dalam Menyelesaikan Konflik Iran dan Arab Saudi Tahun 2013-2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Yang menyatakan



Emil Hikmawan

HALAMAN MOTTO

Bismillaahirrahmaanirrahiim

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

(Q.S. Al-Imran : 159)

”Honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people”

Warren Buffet

“Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya”

Sutan Syahrir

“Kesabaran adalah kunci kesuksesan”

Emil Himawan

PRAKATA



Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidup dan kehidupan kepada seluruh umatnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan baik, Nabi Muhammad Sallallahu ,alaihi wa sallam dan semoga kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir nanti. Amiin.

Penulis tentunya menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. rer.nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk berkonsultasi dan memberikan saran yang terbaik dalam proses belajar di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Gustrieni Putri S.IP, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala arahan, diskusi dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Semoga menjadi amal baik yang senantiasa di berikan balasan oleh Allah. Amiin.
6. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi belajar kepada penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.
8. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
9. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat-surat kebutuhan dalam menunjang penulis untuk menyelesaikan tugas akhir
10. Seluruh teman-teman kelas Politik Islam di Asia Tenggara angkatan 2014 yang telah bersabar dan selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama berada di Universitas Islam Indonesia. Semoga pertemanan kita selama ini terjalin hingga maut memisahkan kita. Amiin
11. Bintar Mupiza dan M. Nursalim Hakim yang telah memberikan waktu dan tempat untuk berdiskusi terkait hal apapun. Semoga menjadi amal baik. Amiin
12. Seluruh teman-teman Program studi HI angkatan 2014 yang semakin kompak dan elegan. Semoga tali silaturahmi kita semua menjadi berkah. Amiin.

**UPAYA ARAB SAUDI TERHADAP ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAN DAN ARAB SAUDI TAHUN
2013-2018**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

EMIL HIKMAWAN

14323020

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Signifikansi.....	9
1.5 Cakupan Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
1.7 Kajian Pustaka... ..	12
1.8 Landasan Teori.....	21
1.8.1 Teori Aktor Rasional.....	21
1.9 Metode Penelitian.....	25
1.9.1 Jenis Penelitian.....	25
1.9.2 Subjek Penelitian.....	26
1.9.3 Alat Pengumpul Data.....	27
1.9.4 Proses Penelitian.....	29
BAB. II Dinamika Hubungan Iran dan Arab Saudi.	31
2.1 Perkembangan Hubungan Iran dan Arab	32
2.2 Dampak Konflik Iran dan Arab Saudi.....	37

BAB. III Upaya Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam Menyelesaikan Konflik Iran dan Arab Saudi tahun 2013-2018.....	42
3.1 Upaya Arab Saudi Terhadap Organisasi Kerja sama Islam.....	42
3.1.1 Arab Saudi Sebagai negara pendonor terbesar.....	43
3.1.2 Dominasi terhadap susunan struktur kelembagaan OKI.....	48
3.2 Organisasi Kerja sama Islam sebagai landasan Arab Saudi dalam meminimalisir kekuatan Iran di Timur Tengah.....	53
BAB. VI KESIMPULAN.....	65
REFERENSI.....	72

UPAYA ARAB SAUDI TERHADAP ORGANISASI KERJASAMA ISLAM
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAN DAN ARAB SAUDI TAHUN
2013-2018

Abstrak

Kawasan Timur Tengah dapat dipahami sebagai kawasan yang rentan dengan konflik. Adanya konflik di Timur Tengah yang semakin berkembang membutuhkan usaha yang konstruktif dan berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi konflik. Salah satu yang menjadi perhatian komunitas internasional adalah semakin memanasnya konflik yang melibatkan negara Iran dan Arab Saudi terutama pasca pemerintah Arab Saudi menetapkan hukuman mati terhadap Syekh Nimr Al-Nimr. Adapun hubungan konflik antara Iran dan Arab Saudi pada awalnya disebabkan oleh adanya dimensi sektarianisme dalam artian persaingan Sunni dan Syi'ah di Timur Tengah. Kemudian, dimensi sektarianisme berkembang menjadi kompetisi geopolitik yakni keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik Iraq, Suriah dan Yaman. Untuk itu melihat dari kondisi di atas tentunya membutuhkan penyelesaian sedemikian rupa. Lebih lanjut, menurut peneliti yang mencoba menempatkan posisinya sebagai pemerintah Arab Saudi dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik dengan Iran lebih cenderung menggunakan keterlibatan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Alasan peneliti lebih cenderung menggunakan OKI dalam menyelesaikan konflik karena Arab Saudi memiliki kedudukan yang besar dalam OKI. Di satu sisi, kedudukan yang dimaksud yaitu sebagai negara pendonor terbesar dan dominasinya dalam struktur lembaga OKI itu sendiri. Untuk itu melalui kedudukannya tentu Arab Saudi sangat diuntungkan daripada menggunakan militer. Di sisi lain, Arab Saudi juga memanfaatkan OKI sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu membendung pengaruh Iran di Timur Tengah.

Middle East region can be realized as region which is susceptible with conflict. The conflict in Middle East which is increasingly needed constructive and sustainable effort in order to reduce a conflict potential. The problem that concern of international community is conflict involving Iran and Saudi Arabia after death penalty to Syekh Nimr Al-Nimr by Saudi Arabia government. Firstly, conflict that happened between Saudi Arabia and Iran caused by sectarianism dimension that's mean Sunni and Shi'ah rivalry in Middle East. Then, sectarianism dimension can evolve into geopolitical competition that Saudi Arabia and Iran's implication in Syria, Iraq and Yemen conflict. Therefore, Middle East conflict requires a peace settlement. Furthermore, the author who takes as Saudi Arabia government in order to solve Saudi Arabia and Iran conflict more likely using Islamic Cooperation Organization (OIC) involvement. Moreover, The author argue that OIC can be conflict resolution agent and Saudi Arabia has affected an OIC. On one hand, the Saudi Arabia was influencing an OIC as the largest country that invest a fund and his domination in OIC structure itself. Therefore, through his influence, Saudi Arabia more profited than military approach. On the other hand, Saudi Arabia has also utilized an OIC as instrument to gain its national interest such as to repress Iran's influence in Middle East

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya di era kontemporer saat ini telah ditemukan berbagai kajian dalam hubungan internasional yang menarik untuk dibahas, salah satunya adalah hubungan antar negara yang memiliki kepentingan berbeda dan dapat memicu konflik khususnya di kawasan Timur Tengah. Artinya bahwa dalam konteks hubungan internasional suatu negara memandang pentingnya meningkatkan pengaruhnya dalam aspek politik maupun ekonomi. Terlepas dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang suatu negara dapat menggunakan cara apapun dalam menyebarluaskan pengaruhnya bahkan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Selain itu hal lainnya yang juga penting untuk diketahui bahwa konflik dalam fenomena hubungan internasional merupakan sesuatu yang alamiah terjadi karena dipicu oleh adanya perbedaan pendapat dalam memandang sesuatu (Galtung, 2007, p. 17). Kemudian konflik yang terjadi secara terus menerus tentunya dapat memberikan ancaman terhadap stabilitas politik yang pada akhirnya akan mendorong negara-negara di dalam suatu kawasan senantiasa terlibat secara aktif dalam suatu konflik. Di satu sisi bahwa suatu negara memiliki kekuatan tersendiri dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan negaranya.

Di sisi lain, negara juga dapat memanfaatkan situasi atau kondisi yang sedang terjadi di negara lainnya dalam usahanya untuk meningkatkan pengaruhnya. Untuk itu perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini banyak ditemukan konflik antar negara yang semakin kompleks. Maka dari itu, memerlukan usaha yang konstruktif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berbicara mengenai salah satu konflik yang terjadi hingga saat ini adalah di kawasan Timur Tengah yang melibatkan aktor negara dalam hal ini Iran dan Arab Saudi. Adapun pemicu yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang semakin berkelanjutan disebabkan oleh adanya dimensi sektarianisme (Patnistik, 2016). Lebih lanjut dimensi sektarianisme dipandang sebagai faktor utama dalam konflik Arab Saudi dan Iran yang mengalami keberlanjutan

Untuk itu maksud dari dimensi sektarianisme adalah bahwa Iran dan Arab Saudi memiliki pandangan berbeda terkait mengenai agama Islam dalam versi yang berbeda. Karena Muslim telah terpisah dalam dua golongan yang berbeda diantaranya adalah Sunni dan Syi'ah. Sehingga dalam konteks Timur Tengah, perbedaan paham keagamaan antara Sunni dan Syi'ah cenderung dikaitkan dengan adanya konflik untuk senantiasa mendapatkan kekuasaan dan sumber daya (Black, 2015). Adapun hal lainnya yang penting untuk diketahui bahwa Jika dilihat dari perspektif sejarah bahwa hubungan konflik antara Iran dengan Arab Saudi dimulai ketika adanya Revolusi Republik Islam Iran 1979 dan Perang Iraq-Iran 1980-1988 (Boone, 2012, p. 1). Peristiwa Revolusi Republik Islam Iran merupakan salah satu bentuk

penggulingan kekuasaan rezim monarki yang didalamnya juga terdapat konflik sektarian Sunni dan Syi'ah (Samosir, 2016).. Lebih lanjut bahwa konflik Iran dan Arab Saudi semakin berkembang pada keterlibatan Arab Saudi dalam mendukung Iraq untuk melawan Iran dalam peristiwa Perang Iraq-Iran 1980-1988. Sehingga kedua peristiwa di atas menunjukkan awal dari adanya rivalitas Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah.

Adapun hal lainnya yang dapat mendorong adanya rivalitas Arab Saudi dan Iran adalah implikasi dari adanya invasi Iraq oleh Amerika Serikat tahun 2003. Lebih lanjut implikasi yang dimaksud adalah penggulingan Presiden Saddam Hussein oleh populasi Syi'ah di Iraq. Untuk itu, Arab Saudi memandang bahwa kekuatan populasi Syi'ah khususnya di Iraq dapat menjadi ancaman karena memudahkan dalam memobilisasi kekuatan Iran yang akan menyebarkan gagasan revolusioner Islam (Erickson, 2017).

Lebih jauh lagi bahwa konflik antara Iran dengan Arab Saudi semakin berkelanjutan terutama pada saat *Arab Springs* tahun 2010. Fenomena Arab Spring merupakan aksi protes secara masif yang menginginkan perubahan rezim otoriter menuju demokratis di Timur Tengah (Erickson, 2017). Adapun peristiwa tersebut membuat Arab Saudi semakin khawatir karena akan mengancam keberadaan rezim monarki itu sendiri yang dipandang Arab Saudi sebagai identitas penting dalam politik internasional. Lebih lanjut, *Arab Springs* dapat mempengaruhi dinamika secara politik dan sosial terhadap masyarakat Saudi yang menganut paham Syi'ah khususnya di Provinsi Timur (Matthiesen, 2012, pp. 628-630).

Kemudian alasan lainnya yang mendorong Arab Saudi untuk senantiasa meningkatkan konfrontasi dengan Iran karena adanya program pengembangan nuklir Iran. Dengan adanya program pengembangan nuklir Iran menjadi salah satu bukti terhadap kekuatan militer yang semakin signifikan dan dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah (Guzanski, 2015). Lebih lanjut, program nuklir Iran yang semakin berkembang tentunya didukung oleh adanya pencabutan sanksi ekonomi yang memudahkan Iran dalam mendapatkan keuntungan secara ekonomi (Armandhanu, 2016).

Namun hal lainnya yang penting untuk diketahui bahwa hubungan konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang pada awalnya disebabkan oleh dimensi sektarianisme. Akan tetapi pengaruh dari adanya perbedaan paham keagamaan berkembang menjadi kompetisi secara geopolitik yang menciptakan rivalitas kedua negara hingga saat ini (Adib-Moghaddam, 2016). Untuk itu, faktor geopolitik yang menimbulkan konfrontasi dapat dilihat melalui keterlibatan Iran dan Arab Saudi dalam konflik di Suriah dan Yaman.

Dalam konteks konflik yang terjadi di Suriah tahun 2016, Arab Saudi telah berkontribusi dalam mendukung pemberontak dengan mengirimkan pasukan perang (FM, 2016). Di satu sisi, adanya pengiriman pasukan tentunya dapat dipahami sebagai sarana pemerintah Arab Saudi untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad. Di sisi lain bahwa tujuan dari pemerintah Arab Saudi untuk terlibat secara tidak langsung dalam konflik di Suriah adalah ingin meminimalisir pengaruh

Iran yang didapatkan melalui Hizbullah yang dilabeli oleh Dewan Kerja sama Teluk sebagai kelompok terorisme untuk menopang rezim Bashar Al-Assad (Arhab, 2016).

Di satu sisi, dengan meminimalisir pengaruh dari Hizbullah tentunya akan memudahkan Arab Saudi dalam menggeser posisi geopolitik Iran. Di sisi lain Presiden Bashar Al-Assad dalam persaingan di Timur Tengah. Terlepas dari adanya pelabelan organisasi terorisme yang ditujukan kepada Hizbullah perlu diantisipasi oleh berbagai pihak termasuk sekutu Arab Saudi karena telah didukung oleh pemerintah Iran.

Lebih lanjut bahwa Iran dan Arab Saudi juga terlibat secara tidak langsung dalam konflik di Yaman tahun 2015. Adapun keterlibatan dari pihak Arab Saudi dalam konflik Yaman yaitu mengirimkan pasukan dan melakukan kampanye militer untuk melawan pemberontak dari kalangan Syi'ah Houthi (Ighani, 2016). Informasi tersebut menunjukkan bahwa Iran tentunya mendukung pemberontak Syi'ah Houthi secara langsung karena kesamaan identitas. Maka dari itu kelompok Syi'ah Houthi dapat juga dilihat sebagai *Iranian Puppet* dalam mendapatkan kekuasaan (Fisher, 2016).

Dengan demikian konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang pada akhirnya terlihat semakin memanas dapat dilihat ketika adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr tahun 2016. Kemudian Syekh Nimr Al-Nimr merupakan ulama kharismatik yang memperjuangkan hak minoritas golongan Syi'ah di Arab Saudi. Adanya eksekusi tersebut tentunya akan semakin memicu konflik yang berkepanjangan antara

kedua belah pihak, sehingga hal tersebut tentunya harus diselesaikan sedemikian rupa, bahkan dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan.

Namun meningkatnya ketegangan antar kedua belah pihak yang mengarah pada konflik semakin terlihat ketika otoritas Arab Saudi telah menetapkan hukuman mati terhadap ulama kharismatik Syi'ah yaitu Syekh Nimr Al-Nimr dengan dakwaan terorisme (Samosir, 2016). Di satu sisi, dinamika yang terjadi pasca eksekusi mati diantaranya pemutusan hubungan diplomatik antara Iran dengan Arab Saudi yang juga diikuti oleh sekutu Arab Saudi dalam hal ini Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain dan Kuwait (Setyanti, 2016). Di sisi lain bahwa adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr tentunya akan semakin menghambat upaya perdamaian untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, misalnya perang di Suriah (Behn, 2016).

Selanjutnya hal penting lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui bahwa adanya perbedaan identitas dalam hal paham keagamaan baik Iran maupun Arab Saudi tentunya berpengaruh dalam bertindak dan berperilaku dalam komunitas internasional. Perbedaan identitas tersebut bahwa Arab Saudi merupakan negara pemimpin Sunni dan Iran juga merupakan negara pemimpin Syi'ah di dunia. Walaupun terdapat perbedaan identitas dalam hal paham keagamaan tersebut dapat menjadi cara pandang dan pedoman dari masing-masing negara dalam mendeskripsikan dirinya di dunia internasional. Terlepas dari adanya paham keagamaan yang berbeda mengenai Islam dapat dipahami oleh negara lainnya sebagai karakteristik yang memiliki keunikan tersendiri yang membedakan satu negara dengan negara lainnya.

Sebagai aktor negara yang memiliki kewenangan secara penuh dalam mengatur urusan dalam dan luar negeri harus memanfaatkan potensi dirinya yaitu dengan menggunakan pembangunan identitas. Menindaklanjuti dari adanya konflik antara Iran dan Arab Saudi yang semakin kompleks membutuhkan seperangkat usaha untuk menghentikan ketegangan tersebut. Adapun usaha yang dimaksud adalah dengan menggunakan pendekatan damai.

Di satu sisi, jika konflik yang semakin memanas antara Iran dengan Arab Saudi tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan khususnya di Timur Tengah. Di sisi lain bahwa dalam mengurangi ketegangan yang terjadi pada Arab Saudi dan Iran dapat menggunakan pendekatan damai. Jika dibandingkan dengan kekuatan militer maka akan memicu pertempuran baru di wilayah Timur Tengah.

Maka dari itu diharapkan konflik yang terjadi antara Arab Saudi dengan Iran dapat diselesaikan dengan sedemikian rupa mengingat bahwa kedua negara memiliki posisi penting di kawasan Timur Tengah. Berbicara mengenai posisi Arab Saudi dapat dilihat dalam perkembangan politik dan ekonomi di Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya paham Sunni yang mampu mendominasi secara mayoritas negara anggota Timur Tengah dalam usahanya untuk membendung kekuatan dari paham Syi'ah yang diprakarsai oleh Iran. Artinya penyebaran ideologi menjadi salah satu sarana Arab Saudi dalam meningkatkan kedudukannya di Timur Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya konflik antara Iran dan Arab Saudi tepatnya pasca eksekusi mati Syekh Nimr oleh pemerintah Arab Saudi membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengkaji **bagaimana upaya Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tahun 2013-2018?**

Adapun peneliti mengambil negara Arab Saudi karena memiliki posisi penting di Timur Tengah terutama dalam memperkuat eksistensi dari Organisasi Kerja sama Islam yang merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB yang memfokuskan pada penyelesaian konflik yang melanda umat Islam di dunia. Selain itu Arab Saudi merupakan negara yang memprakarsai dalam menyebarluaskan aliran keagamaan Sunni secara terus menerus yang pada akhirnya membuat banyak negara anggota Organisasi Kerja sama Islam di wilayah Timur Tengah mengadopsi paham Sunni tersebut. Artinya secara mayoritas, paham Sunni mendominasi di kawasan Timur Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat bertujuan untuk :

1. Menganalisis upaya Arab Saudi terhadap internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tahun 2013-2018.
2. Untuk mengetahui instrumen yang digunakan oleh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tahun 2013-2018.

1.4 Signifikansi

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk memberikan analisis kritis terkait penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah dalam hal ini antara Iran dengan Arab Saudi yang akan dilakukan oleh Organisasi Kerja sama Islam dari sudut pandang Arab Saudi. Artinya Arab Saudi senantiasa ingin memberikan upaya terhadap organisasi Islam tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi yang semakin berkelanjutan. Hal lainnya bahwa Arab Saudi melihat potensi yang dimiliki oleh negaranya dapat dijalankan melalui keterlibatan aktif dalam Organisasi Kerja sama Islam.

1.5 Cakupan Penelitian

Adanya cakupan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu cakupan penelitian memberikan upaya dalam menentukan konsep atau pendekatan dari suatu permasalahan, sehingga berbagai permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik. Lebih lanjut bahwa pokok permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tentunya harus dibatasi dengan sedemikian rupa.

Hal ini dilakukan agar peneliti mampu menginterpretasikan hasil penelitiannya sesuai dengan pokok permasalahan dan menghindari kerancuan terhadap objek yang diamati. Oleh karena itu berbicara mengenai ruang lingkup dari penelitian ini yaitu analisa mengenai pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tepatnya pasca eksekusi mati syekh Nimr Al-Nimr tepatnya pada tahun 2013-2018. Adapun hal

lainnya yang penting untuk diketahui bahwa peneliti juga beranggapan ruang lingkup yang dijelaskan di atas dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam empat bab. Pada dasarnya bab 1 akan menjelaskan mengenai latar belakang dan permasalahan. Dalam bab 1, penulis akan memberikan informasi tentang konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang semakin memanas tepatnya dalam kurun waktu 2013-2018. Selain itu, penulis akan mengangkat permasalahan mengenai pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi. Adapun dalam bab 1 juga akan dibahas mengenai teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjawab topik permasalahan yang sedang dibahas.

Kemudian pada bab 2, penulis akan memaparkan hubungan Iran dan Arab Saudi dari perspektif sejarah, hubungan konflik antar kedua negara beserta sebab terjadinya konflik dan perkembangan hubungan diplomatik kedua negara hingga saat ini. Dalam bab 2 juga akan dijelaskan terkait dampak konflik Iran dan Arab Saudi terhadap internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam maupun di regional Timur Tengah.

Selanjutnya pada bab 3 akan menjelaskan tentang instrumen yang akan digunakan oleh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam itu sendiri dalam memberikan usahanya untuk menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi yang semakin berkelanjutan. Lebih lanjut bahwa dalam bab 3 akan memberikan suatu

analisis terkait bagaimana Arab Saudi dapat menggunakan upayanya terhadap aktivitas Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi berdasarkan Teori Aktor Rasional. Adapun dalam bab 3 dijelaskan juga mengenai kepentingan Arab Saudi dalam memberikan pengaruhnya terhadap OKI untuk terlibat secara langsung dalam penyelesaian konflik tersebut.

Terakhir bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis akan memberikan uraian secara garis besar terkait pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam mengatasi konflik Iran dan Arab Saudi berdasarkan temuan dan data yang telah didapatkan melalui studi kepustakaan. Maka dari itu dalam bab ini juga memberikan gambaran untuk kedepannya terkait efek dan hasil dari keterlibatan secara langsung Arab Saudi dalam internal kelembagaan OKI untuk menyelesaikan konflik ini. Hal penting lainnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya juga membutuhkan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan gagasan yang telah disampaikan oleh penulis.

1.7 Kajian Pustaka

Secara umum dalam penelitian ini akan memfokuskan pada analisa peran Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Maka dari itu, peneliti berusaha untuk mencoba mengidentifikasi berbagai tulisan yang membahas keterlibatan Organisasi Kerja sama Islam terutama dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam di seluruh dunia khususnya di regional Timur Tengah. Lebih lanjut bahwa OKI dapat menjadi organisasi Islam dalam misinya untuk membangun perdamaian di dunia internasional.

Intervensi yang dilakukan OKI dapat ditelusuri pada keterlibatannya dalam isu pelanggaran HAM di Kashmir yang disampaikan oleh Raja Amir Hanif yang ditulis pada *Journal of Peace Studies History* yang berjudul "*Pakistan, OIC and The Challenges of Muslim World*". Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa isu pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir turut didiskusikan dalam forum OKI yang juga melibatkan pemerintah Pakistan, India, dan koordinasi dengan PBB. Namun pada awalnya isu ini dibahas atas inisiasi dari Pakistan untuk didiskusikan dalam berbagai forum OKI.

Dengan adanya inisiasi dari Pakistan membuat OKI untuk membangun relasi konstruktif dengan PBB dan pemerintah India. Pada akhirnya berbagai perundingan telah dilakukan melalui forum OKI dan berhasil dalam mengamankan berbagai resolusi konflik. Adapun resolusi tersebut mengecam pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh pasukan perdamaian India di Kashmir dan juga memberikan bantuan

dana kepada pemerintah Pakistan untuk mengatasi pelanggaran HAM di Kashmir (Hanif, 2014, pp. 48-49).

Hal ini membuktikan bahwa OKI menjadi forum dalam dukungan politik pemerintah Pakistan. Adapun peneliti menilai bahwa dalam tulisan tersebut belum menjelaskan mengenai keefektifan dari adanya suatu resolusi yang ditetapkan oleh OKI terkait pelaksanaan hak asasi manusia dan belum menjamin bahwa resolusi yang dikeluarkan dapat berjalan dengan sedemikian rupa.

Keterlibatan lainnya dari OKI dalam konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya dapat dilihat pada upaya OKI dalam menyelesaikan konflik antara Organisasi Pembebasan Palestina dengan Jordania. Untuk itu peneliti akan mengutip tulisan yang dimuat dalam *Intellectual Discourse* yang ditulis oleh Abdullah Al-Hasan yang berjudul *Conflict among Muslim Nations: Role of the OIC in Conflict Resolution* menyatakan bahwa faktor yang memicu terjadinya konflik yang terjadi kepada kedua belah pihak adalah perbedaan instrumen yang digunakan untuk melawan Israel.

Pihak dari Organisasi Pembebasan Palestina lebih cenderung menggunakan pendekatan secara militer, sedangkan pihak dari Jordania memilih dengan pendekatan yang lebih pragmatis yang berarti tidak menggunakan cara kekerasan. Sehingga dengan adanya konflik yang berkepanjangan membuat OKI untuk terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tersebut. Adapun upaya yang dilakukan adalah melalui mediasi yang juga melibatkan pemerintah Arab Saudi dan Mesir.

Dalam proses mediasi tersebut yang dilakukan oleh OKI, Arab Saudi, dan Mesir pada akhirnya membuahkan hasil yaitu dibuatnya perjanjian yang menyatakan bahwa baik Jordania maupun Organisasi Pembebasan Palestina diberikan tempat untuk memainkan politik di Palestina serta secara bertahap Organisasi Pembebasan Palestina menerima pengakuan internasional sebagai satu-satunya wakil dari rakyat Palestina (Al-Ahsan, 2004, pp. 139-140). Menurut peneliti, tulisan di atas menandakan bahwa mediasi yang melibatkan OKI telah mencapai keberhasilan akan tetapi dalam tulisan tersebut belum menjelaskan secara spesifik mengenai kepentingan Arab Saudi dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun dalam tulisan lainnya yang ditulis oleh Ibrahim Sharqieh yang berjudul "*Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflicts?*" dalam *Peace and Conflict Studies* menjelaskan mengenai upaya OKI dalam menyelesaikan konflik antara Iran dengan Irak. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa adanya perselisihan tersebut disebabkan oleh masalah sektarian antara Sunni dengan Syi'ah yang disertai dengan aksi kekerasan, bahkan dalam perselisihan tersebut kehidupan warga sipil semakin terancam.

Perselisihan di atas menyebabkan OKI harus terlibat dengan memfasilitasi kedua belah pihak melalui rekonsiliasi atau perundingan damai yang bertempat di Makkah. Adapun perundingan damai yang diinisiasi oleh OKI mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan menetapkan resolusi yang dikenal dengan Deklarasi Makkah yang menyatakan bahwa seluruh kaum muslimin di Irak dan Iran harus senantiasa

menolak untuk saling membunuh antar umat Islam dan harus menjaga kedaulatan dan martabat setiap individu (Sharqieh, 2012, pp. 168-169).

Berdasarkan informasi tersebut bahwa dapat dilihat sebagai pencapaian OKI dalam menyelesaikan konflik sektarian antara Iran dengan Iraq. Perdamaian sosial yang diharapkan oleh komunitas Islam di seluruh dunia tentunya menjadi agenda penting dari OKI. Selain itu menurut peneliti bahwa dalam tulisan tersebut seharusnya juga menjelaskan pengaruh yang dapat ditimbulkan dari adanya perselisihan Iran dan Iraq khususnya di kawasan Timur Tengah terutama dalam aspek politik dan ekonomi.

Lebih lanjut untuk menganalisa peran dari Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik, peneliti akan mengutip buku yang ditulis oleh Turan Kayaoglu yang berjudul *The Organisation of Islamic Cooperation : Politics, Problem, and Potential*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Organisasi Kerja sama Islam memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam dengan menggunakan pendekatan *cultural competency, moral power, and partnership*.

Selain itu dalam buku ini menekankan pada analisa peran OKI dalam menyelesaikan konflik Iran dan Iraq melalui kemitraan (*partnership*) dengan organisasi internasional dalam hal ini adalah PBB dan cenderung berhasil (Kayaoglu, 2015, p. 70). Untuk itu adanya relasi dengan PBB membuat OKI dapat berpengaruh lebih luas dalam usahanya untuk menjadi salah satu agen resolusi konflik dan dapat meningkatkan kredibilitas di dunia internasional.

Adapun dalam tulisan ini masih ditemukan berbagai kekurangan yaitu belum menjelaskan kepentingan dari PBB untuk terlibat secara langsung dalam konflik Iran dan Iraq. Selain itu tulisan ini belum memaparkan secara spesifik alasan OKI menggunakan pendekatan kemitraan dengan PBB dibandingkan menggunakan kekuatan moral dan kompetensi budaya. Maka dari itu penting untuk dijelaskan juga mengenai kepentingan OKI melalui keterlibatannya dengan PBB dalam membawa misi perdamaian khususnya di Timur Tengah.

Berbicara mengenai keterlibatan OKI dalam mengatasi konflik dapat kita lihat pada konflik di Yaman, sehingga peneliti mengutip tulisan M. Ihsan Qadir & M. Saifur Rehman yang berjudul "*Organization of Islamic Co-operation (OIC) and Prospects of Yemeni Conflict Resolution : Delusion or Plausible Reality*" yang dimuat dalam *Journal of Political Studies*. Dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa peran OKI dalam menyelesaikan konflik di Yaman hanya terbatas pada penetapan resolusi konflik, menjadi mediator dan menuntut adanya intervensi dari negara anggota OKI lainnya yang senantiasa akan mempengaruhi kredibilitas OKI sebagai organisasi antar pemerintah yang telah diakui secara internasional untuk mengatasi berbagai perselisihan (Rehman, 2015, pp. 373-378).

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi OKI dalam mencapai kepentingannya yang senantiasa akan menjadi suatu indikator bagi masyarakat internasional untuk menilai seberapa efektif OKI mampu menciptakan perdamaian di negara Islam. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh OKI dalam konteks konflik di Yaman dinilai cukup efektif. Namun tulisan tersebut belum menjelaskan terkait

adanya jaminan bahwa negara anggota OKI tidak terlibat dalam konflik di Yaman dan adanya pengaruh rivalitas antara Iran dan Arab Saudi.

Selanjutnya peneliti akan mengutip tulisan Mohamed Bin Huwaidin yang berjudul "*The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations*" yang dimuat pada *Review of History and Political Science*. Dalam tulisan ini telah memaparkan informasi mengenai rivalitas antara Arab Saudi dengan Iran dalam menyebarkan pengaruhnya khususnya di Yaman. Adanya rivalitas antara kedua negara pada awalnya disebabkan oleh adalah faktor ideologi yaitu perbedaan paham keagamaan dalam hal ini Sunni dan Syi'ah (Huwaidin, 2015, pp. 73-76).

Arab Saudi menganggap bahwa keberadaan Syi'ah Houthi di Yaman merupakan suatu ancaman karena dikhawatirkan sebagai wakil dari Iran untuk meningkatkan pengaruhnya dan mengendalikan negara tersebut. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk menjauhkan pengaruh Yaman dari Iran adalah dengan menciptakan koalisi militer. Tulisan ini telah menjelaskan faktor yang membuat Iran dan Arab Saudi mengalami ketegangan akan tetapi belum menjelaskan terkait tindakan yang akan diambil oleh Iran dalam mengatasi serangan militer Arab Saudi.

Adapun dalam tulisan Reza Ekhtiari Amiri yang berjudul "*Iraqi Invasion of Kuwait as Turning Point in Iran-Saudi Relationship*" dan dimuat dalam *Journal of Politics and Law* menjelaskan bahwa awal ketegangan antara Iran dan Arab Saudi ketika tahun 1979 yang ditandai dengan peristiwa Revolusi Republik Islam Iran dan juga diikuti dengan adanya perang Iran dan Iraq tahun 1980. Lebih lanjut bahwa Arab

Saudi telah mengintervensi dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer untuk mendukung Iraq serta membentuk Dewan Kerja sama Teluk untuk mengatasi ancaman dari Iran, sehingga dukungan Arab Saudi terhadap Iraq menimbulkan ketegangan antara Arab Saudi dengan Iran (Amiri, 2011, pp. 188-189).

Maka dari itu Arab Saudi berusaha untuk memperkuat perannya di regional Timur Tengah melalui dukungan terhadap Iraq dalam perang antara Iraq dengan Iran. Tulisan ini menjelaskan implikasi dari adanya perang Iraq dan Iran terhadap hubungan Iran dan Arab Saudi terutama pasca Revolusi Republik Islam Iran yang menjadi peristiwa bersejarah di Timur Tengah. Terlepas dari hal tersebut, peneliti menilai bahwa tulisan ini belum menjelaskan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Iran setelah peristiwa Revolusi Republik Islam Iran.

Lebih lanjut untuk memahami konflik yang terjadi antara Iran dan Arab Saudi, peneliti mengutip tulisan Mahdi Alikhani & Mehdi Zakerian yang berjudul "*Study of Factors Affecting Saudi-Iranian Relations and Conflicts and Their Resulting Behavior Pattern*" yang dimuat dalam *Journal of Politics and Law*. Adapun tulisan ini menjelaskan bahwa pola hubungan antara Arab Saudi dengan Iran yang cenderung mengarah pada konflik disebabkan oleh perubahan geopolitik di regional Timur Tengah, struktur yang memberikan penekanan pada hubungan luar negeri terutama dengan Amerika Serikat dan berkaitan dengan cara kedua negara dalam mendistribusikan kekuasaannya di Teluk Persia (Zakerian, 2016, pp. 178-183).

Untuk itu berkaitan dengan faktor geopolitik yaitu yang termasuk dalam perbedaan paham ideologi negara dalam memahami karakteristik dan keunikan dari suatu wilayah. Hal lainnya yang juga penting bahwa faktor struktural juga memainkan peranan penting dalam konflik antar kedua negara dalam hal ini adalah program nuklir Iran yang dapat memberikan ancaman terhadap kekuatan Arab Saudi. Lebih lanjut tulisan ini telah memberikan penjelasan beberapa faktor yang mengarahkan pada konflik Iran dan Arab Saudi. Namun dalam tulisan ini belum menjelaskan hubungan Iran dan Amerika Serikat dalam hal keberlanjutan program nuklir Iran hingga saat ini.

Kemudian peneliti mengutip tulisan Kevin Downs yang berjudul “*A Theoretical Analysis of the Saudi-Iranian Rivalry in Bahrain*” dalam *Journal of Politics and International Studies* menjelaskan mengenai rivalitas Iran dan Arab Saudi khususnya di Bahrain. Tulisan ini menjelaskan bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi di Bahrain memicu protes dari kelompok Syi’ah dan menyuarakan untuk pergantian kekuasaan di dalam pemerintahan. Adanya hal ini membuat Arab Saudi terlibat untuk mempertahankan kekuasaan karena apabila keluarga Al-Khalifa berhasil dijatuhkan dan dengan meningkatnya dukungan untuk pemerintah pro-Iran, maka akan menjadi suatu ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional Arab Saudi (Downs, 2013, pp. 205-212).

Oleh karena itu Arab Saudi ingin tetap mempertahankan dominasinya terhadap Bahrain dari pengaruh Iran. Kekhawatiran dari Arab Saudi menandakan bahwa Iran mencoba untuk menyebarkan ide revolusionernya ke negara-negara di

regional Timur Tengah. Lebih lanjut tulisan ini telah menyatakan bahwa salah satu aspek yang penting dalam politik adalah meningkatkan ketergantungan dengan negara yang kuat dalam mempertahankan kekuasaan. Namun dalam tulisan ini belum menjelaskan tindakan Iran dalam melindungi kepentingannya di Bahrain ditengah persaingannya dengan Arab Saudi.

Dengan demikian melihat dari penelitian-penelitian dan sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa sampai saat ini belum ditemukan tulisan mengenai peran Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik antara Iran dengan Arab Saudi melalui Organisasi Kerja sama Islam. Sehingga dalam tulisan ini peneliti akan memfokuskan pada pembahasan mengenai upaya Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi dalam kurun waktu 2013-2018. Lebih lanjut, pembahasan dalam tulisan ini akan menggunakan sudut pandang dari Arab Saudi.

1.8 Landasan Teori

1.8.1 Teori Aktor Rasional

Pada dasarnya manusia telah diberikan akal dan pengetahuan untuk berfikir terhadap sesuatu. Artinya setiap manusia harus mampu menggunakan pemikirannya untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam berkehidupan. Adapun kaitannya dengan teori aktor rasional beranggapan bahwa manusia bersifat rasional, sehingga tindakan yang dilakukan oleh aktor tertentu dianggap rasional karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman (Rafael Witteck, 2013, pp. 1-2). Lebih lanjut peneliti dalam menjelaskan teori aktor rasional lebih cenderung menggunakan gagasan Graham T. Allison.

Menurut Graham T. Allison bahwa dalam menentukan politik luar negeri suatu negara harus memperhatikan berbagai konsekuensi yang akan diterima dari kebijakan tersebut. Penjelasan di atas merupakan suatu interpretasi dari pernyataan Graham T. yaitu : *“governments select the action that will maximize strategic goals and objectives”* (Allison G. T., 1971, p. 32). Adapun gagasan Graham di atas juga menjelaskan bahwa objek dari teori aktor rasional mengacu pada bagaimana pengambil keputusan (*decision maker*) dapat menentukan perilakunya dalam mencapai kepentingan luar negerinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara tersebut (Paul Anand, 2009, p. 16).

Untuk itu pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh pemimpin suatu negara didasarkan pada sesuatu yang sangat diperlukan negaranya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki negara tersebut. Artinya kapasitas yang dimiliki oleh suatu negara harus mampu menerima resiko dari pelaksanaan kebijakan luar negeri. Maka dari itu aktor negara selalu mengedepankan aspek kebutuhan dari pada keinginan.

Dari paparan informasi di atas, peneliti beranggapan bahwa secara tradisional, suatu negara harus memiliki posisi penting dalam keberlangsungan hidupnya. Apalagi yang berkaitan erat dengan politik luar negeri, sehingga dengan adanya posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang semakin tinggi tentunya dapat dipahami negara lain sebagai kekuatan dalam membangun hubungan luar negeri. Maka pada akhirnya posisi tersebut dapat menarik perhatian dari negara lainnya untuk mendapatkan apa yang negara tersebut butuhkan.

Selain itu, berdasarkan dari pemikiran Graham T. Allison mengungkapkan bahwa negara dikatakan sebagai aktor rasional yang mampu menentukan pilihan kebijakan yang paling menguntungkan dalam mencapai kepentingannya (Allison, 1971, p. 33). Lebih lanjut asumsi di atas mengacu pada pentingnya kemampuan negara dalam memilih keputusan karena akan mempengaruhi hasil akhir. Untuk itu, negara melalui pemerintahnya harus menghindari konsekuensi yang paling merugikan dalam mencapai tujuannya.

Adapun asumsi di atas juga dapat mendukung anggapan bahwa negara menjadi pemain utama dalam hubungan internasional karena berkaitan erat dengan hasil kompetisi antar aktor (Shahryarifar, 2016, pp. 25-26). Akan tetapi hal lainnya yang dianggap penting untuk diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya suatu permasalahan yang terjadi tentunya aktor individu dalam hal ini pemimpin suatu negara juga dianggap penting dalam perkembangan dunia politik. Maka dari itu teori aktor rasional berkaitan dengan prosedur pembuatan keputusan.

Sementara itu sebagai makhluk yang rasional tentunya memiliki berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan (*goals*) yang ingin dicapai oleh aktor negara. Dalam mencapai tujuannya, aktor harus menentukan berbagai alternatif yang akan membawa mereka menuju keuntungan yang maksimal, sehingga penting untuk menentukan tindakan yang diprioritaskan (Borgotta, 1992, p. 34). Adapun dalam konteks politik internasional, perilaku yang dilakukan oleh suatu negara menjadi pertimbangan dalam merealisasikan agendanya.

Asumsi lainnya dari teori aktor rasional yang mendukung gagasan Graham T. Allison mengacu pada penggunaan cara yang bersifat efisien dalam mencapai keuntungan yang paling maksimal dan berusaha untuk menghindari tindakan yang mengarah pada perolehan kerugian (Budiardjo, 2013, p. 93). Terlepas dari hal tersebut perilaku manusia hanya merupakan instrumen dalam untuk melakukan perhitungan yang rasional dan merumuskan perilaku dari aktor lainnya. Maka dari itu optimalisasi kepentingan dapat dipahami sebagai inti dari teori aktor rasional.

Selain itu tujuan dan sasaran yang tersusun secara sistematis oleh negara setidaknya akan mencerminkan preferensinya terkait tindakan apa yang diperlukan (Jonge, 2012, pp. 7-9). Di satu sisi setiap manusia memiliki keterbatasan dalam hal berfikir karena didasarkan pada pengetahuan yang mereka dapatkan. Di sisi lain bahwa pembuatan pilihan harus senantiasa dipertimbangkan dan dioptimalkan karena akan mempengaruhi hasil.

Lebih lanjut aplikasi dari teori aktor rasional di atas dalam tulisan ini yaitu aktor negara dalam hal ini pemerintah di bawah kepemimpinan Raja Salman menentukan tindakan yang lebih diutamakan dalam mencapai kepentingannya. Berbicara mengenai salah satu kepentingan yang diprioritaskan saat ini adalah menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi. Selanjutnya negara Arab Saudi dibawah kepemimpinan Raja Salman dapat menyusun berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian Arab Saudi melakukan identifikasi dan analisa berbagai pilihan yang telah tersedia.

Langkah berikutnya yaitu Arab Saudi akan senantiasa menelusuri terkait biaya dan manfaat yang akan didapatkan setelah menentukan pilihan. Namun dalam tahapan ini, aktor dalam hal ini negara harus mampu memperkirakan berbagai konsekuensi yang akan terjadi jika memilih opsi yang dianggap paling menguntungkan. Artinya bahwa tidak hanya melibatkan keuntungan maupun kerugian semata akan tetapi harus mampu merumuskan efek jangka pendek dan jangka panjang jika pilihan terbaik tersebut menjadi opsi yang paling baik.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang kenyataan di antara berbagai faktor atau berbagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai objek penelitian yaitu pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr (Casterle, 2012, p. 4). Selanjutnya berbicara mengenai penelitian kualitatif adalah suatu prosedur dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari berbagai perilaku seseorang yang diamati (Moloeng, 1994, p. 3).

Artinya dalam hal ini penelitian kualitatif memfokuskan pada pengamatan aktivitas-aktivitas manusia untuk memperoleh suatu kebenaran dan keaslian terhadap objek yang diteliti. Maka dari itu proses dari pengumpulan data adalah bagian terpenting dari penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan sifat penelitian dalam hal ini adalah deskriptif.

Maksud dari deskriptif adalah penggambaran secara mendalam yang berkaitan dengan situasi tertentu. Mengingat sifat ini maka penelitian kualitatif tidak berupaya untuk menguji hipotesis. Bukan berarti bahwa penelitian ini tidak memiliki asumsi awal yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Namun penelitian kualitatif

mencoba untuk mencari kepastian terhadap objek yang diteliti, sehingga tidak ada usaha untuk menguji hipotesis.

Oleh karena itu dalam penelitian ini laporan yang ditulis adalah berupa narasi cerita yang menggambarkan secara luas objek yang diamati. Hal yang terpenting bahwa alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena akan memudahkan peneliti dalam mencari data-data yang mendukung peneliti dalam membuat hasil analisa terkait pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam di seluruh dunia, terutama antara Iran dengan Arab Saudi.

Alasan lainnya bahwa laporan dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Lebih lanjut penggunaan analisis deskriptif tentunya akan memudahkan pembaca dalam memahami proses pengumpulan data yang dapat mendukung argumen penulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, setiap kasus atau fenomena dalam kehidupan masyarakat yang ada akan diperlakukan sebagai suatu entitas yang unik.

1.9.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan Arab Saudi sebagai subjek penelitian. Adapun penggunaan Arab Saudi sebagai subjek penelitian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam tersebut dalam menyelesaikan suatu konflik. Selain itu alasan lainnya yang mendorong Arab Saudi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian karena

sebagai aktor penting yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perkembangan politik di Timur Tengah.

Dengan demikian, peneliti akan memperoleh berbagai informasi penting terkait topik penelitian ini, sehingga pemilihan subjek penelitian di atas tentunya lebih menenkankan pada data apa yang sedang dicari untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.9.3 Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan atau studi literature yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen yang disajikan dalam buku-buku, jurnal, dan berbagai artikel yang memuat tentang informasi yang juga berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini (Corbin, 1998, p. 326). Artinya penulis dalam penelitian ini akan menggunakan data-data dan informasi untuk mendapatkan berbagai aktivitas dan pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam usahanya untuk menciptakan resolusi konflik antara Iran dan Arab Saudi.

Selain itu metode kepustakaan dianggap penting, mengingat bahwa penelusuran data melalui dokumen akan menjadi langkah awal peneliti dalam menganalisis data atau informasi penting yang akan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal yang terpenting dalam mendapatkan informasi, peneliti harus memastikan bahwa data atau informasi yang didapatkan mengandung

suatu unsur kebenaran (validitas) yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai sumber dalam penelitian ini.

Selanjutnya dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam menjawab objek penelitian adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat dipahami sebagai informasi atau data yang didapat melalui tulisan, buku-buku, jurnal yang memuat informasi tentang pengaruh Arab Saudi dalam aktivitas yang akan dilakukan oleh Organisasi Kerja sama Islam untuk merespon konflik antara Iran dan Arab Saudi serta berusaha untuk menciptakan resolusi konflik tersebut melalui berbagai forum internasional yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut atau secara institusional (Tracy Long-Sutehall, 2011, p. 336).

Artinya dalam hal ini penulis harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Arab Saudi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap Organisasi Kerja sama Islam terutama ketika isu konflik Iran dan Arab Saudi dibahas dalam forum kelembagaan resmi organisasi tersebut. Tujuan diperolehnya data atau informasi melalui data sekunder adalah sebagai usaha penulis dalam mengidentifikasi pola yang digunakan Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Oleh karena itu diharapkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui studi kepustakaan dapat membantu pembaca dalam memahami upaya OKI dalam menindaklanjuti konflik yang terjadi antara Iran dengan Arab Saudi. Metode kepustakaan tentunya menjadi bagian yang penting dalam penelitian kualitatif karena menjadi salah satu rujukan setiap penulis yang menggunakan metode penelitian

kualitatif dalam merumuskan sebuah penelitian yang pada akhirnya disajikan dalam bentuk narasi, sehingga dalam hal ini memudahkan peneliti dalam mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian.

1.9.4 Proses Penelitian

Berbicara mengenai proses dalam penelitian ini, peneliti cenderung melakukan analisa melalui beberapa tahap yang merujuk pada informasi yang ditulis oleh Creswell yakni mempersiapkan data untuk diolah dan dokumentasi data-data lainnya yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan (Creswell, 2003, p. 17). Tahap awal dalam menganalisis data adalah pengumpulan data yang telah didapatkan oleh peneliti yang memuat informasi terkait objek penelitian.

Dalam proses pengumpulan data kualitatif adalah data yang berupa perilaku atau fenomena, dan sikap yang diperoleh peneliti. Langkah kedua setelah proses pengumpulan data, penulis mencoba untuk membaca keseluruhan data atau informasi yang bertujuan untuk memahami ide-ide atau gagasan yang tersirat dalam data dan perlu diketahui dalam tahap pengumpulan data, peneliti juga mencatat informasi penting untuk melakukan kategorisasi.

Langkah ketiga dalam penelitian ini adalah melakukan pemetaan (*coding*) terhadap data-data yang diperoleh penulis dengan melakukan penamaan diantaranya hubungan konflik antara Iran dengan Arab Saudi, pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam, strategi Arab Saudi dalam mempengaruhi Organisasi Kerja sama Islam dalam menciptakan resolusi konflik dan aktivitas Organisasi Kerja sama Islam dalam menindaklanjuti konflik Antara Iran dengan Arab Saudi.

Tahapan ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan reduksi data yang berarti bagian dari kegiatan analisis, sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang harus dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang dan semua itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis (Idrus, 2007, p. 182).

Dengan begitu proses reduksi data atau kategorisasi data dimasukkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data, sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan proses verifikasi. Langkah keempat yang dilakukan penulis adalah mengembangkan narasi yang didasarkan atas kategorisasi data atau informasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Pada tahap ini peneliti mencoba untuk membuat sebuah analisa dalam bentuk deskripsi yang disesuaikan atas hasil pemetaan data tersebut yang juga bertujuan sebagai langkah dalam menentukan penarikan kesimpulan terhadap objek dalam penelitian ini. Tahap kelima yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menuliskan hasil deskripsi terhadap temuan-temuan yang diperoleh ketika proses pengembangan narasi dan dalam tahap ini peneliti juga mencoba untuk melakukan interpretasi terhadap berbagai temuan dari penelitian ini.

BAB. II

Dinamika Hubungan Iran dan Arab Saudi

Dalam perkembangannya rivalitas Arab Saudi dan Iran di regional Timur Tengah dipicu oleh perbedaan paham keagamaan (sektarianisme) Sunni dan Syi'ah. Lebih lanjut, ketegangan antara Iran dengan Arab Saudi semakin berkelanjutan karena keinginan kedua negara untuk terlibat dalam konflik di Timur Tengah, misalnya Suriah, Yaman dan Iraq. Hal yang penting untuk diketahui juga bahwa keterlibatan Arab Saudi dan Iran khususnya dalam *proxy war* di Suriah dan Yaman tentu mengakibatkan stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di wilayah Timur Tengah semakin terancam.

Selanjutnya, baik Arab Saudi maupun Iran merupakan negara yang memiliki posisi penting dalam keberlangsungan politik dan ekonomi terhadap negara anggota di Timur Tengah. Maka dari itu, peneliti merasa bahwa kedua negara memiliki potensi untuk saling mendukung dalam memfasilitasi proses perdamaian di Timur Tengah. Terlepas dari Arab Saudi dan Iran yang secara terus menerus meningkatkan konfrontasi untuk mendapatkan kekuasaan Timur Tengah tentunya dipandang sebagai upaya dari masing-masing negara untuk mempromosikan kepentingan luar negerinya.

Lebih lanjut, identitas Timur Tengah yang rentan dengan konflik harus diubah dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu, konflik Arab Saudi dan Iran yang semakin memanas pada 2016 tentu membutuhkan upaya perdamaian. Terlepas dari usaha Arab Saudi dan Iran menginginkan dalam membangun hubungan damai. Maka dari itu penting juga untuk melihat dari perkembangan hubungan Iran dan Arab Saudi.

2.1 Perkembangan Hubungan Iran dan Arab Saudi

Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk mengeksekusi mati Syekh Nimr telah berkontribusi dalam ketegangan antara Arab Saudi dengan Iran yang semakin meningkat. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh kepentingan dari masing-masing negara dengan tujuan untuk membentuk dukungan dan kekuatan di regional Timur Tengah. Terlepas dari hal tersebut tentunya hubungan Iran dan Arab Saudi pasca eksekusi mati Syekh Nimr menyebabkan permasalahan internal maupun eksternal negara tersebut semakin kompleks.

Adanya perubahan hubungan Iran dan Arab Saudi dapat dilihat ketika kedua negara memutuskan hubungan diplomatik. Hal tersebut merupakan refleksi dari adanya penyerangan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Syi'ah di Iran terhadap Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran, Iran (Chulov, 2016). Maka dari itu, pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Iran tentunya akan semakin mempengaruhi tatanan politik, keamanan dan ekonomi khususnya di regional Timur Tengah.

Selain itu, ketegangan antara Iran dengan Arab Saudi yang semakin memanas menyebabkan pemerintah Iran tidak memberikan izin kepada warganya untuk melakukan perjalanan ziarah tahunan ke Mekkah (Erdbrinkmay, 2016). Tindakan tersebut menandakan bahwa masyarakat Iran untuk tahun 2016 tidak diperbolehkan melaksanakan haji dan ziarah ke Mekkah yang merupakan agenda tahunan. Di satu sisi, umat Islam di Iran yang secara mayoritas mengadopsi paham Syi'ah akan senantiasa mengalami kesulitan untuk mengunjungi tempat bersejarah di Arab Saudi.

Di sisi lain bahwa segala tindakan yang bernuansa politis dan mengarah pada konflik cenderung berimplikasi pada berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh kedua negara.

Dalam perkembangannya, hubungan konflik Arab Saudi dan Iran di regional Timur Tengah yang terjadi hingga saat ini adalah adanya program rudal balistik Iran. Hal tersebut membuat Arab Saudi melakukan pertemuan dengan negara anggota Liga Arab pada tahun 2017 yang pada akhirnya menciptakan resolusi bahwa mengecam agresi Iran di Arab Saudi dan tentunya akan mengancam keamanan nasional Arab Saudi (The National UEA, 2017). Walaupun demikian, negara anggota Liga Arab harus memastikan bahwa apakah tindakan Iran di atas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai program rudal balistik.

Adapun perkembangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan Iran dan Arab Saudi dapat ditelusuri melalui pengunduran diri Hariri yang menjabat sebagai Perdana Menteri Lebanon. Lebih lanjut bahwa setelah pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon yaitu Hariri pada 4 November 2017 membuat Arab Saudi senantiasa mengintensifkan konfrontasi dengan Iran khususnya di Lebanon (Ibish, 2017). Adanya tindakan tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap Hariri yang merupakan sekutu setia Arab Saudi. Selain itu, Arab Saudi tentunya memiliki pandangan bahwa dengan mundurnya Hariri dapat berdampak pada meningkatnya dukungan secara terus menerus oleh Iran terhadap kelompok Hizbullah sebagai mitranya dalam mendapatkan kekuasaan di Libanon. Hal ini tentunya dapat mendorong rivalitas Arab Saudi dan Iran di Libanon yang semakin kompleks.

Di satu sisi, Hariri merupakan aliansi utama Arab Saudi di Lebanon yang mampu memainkan peran dalam pemerintahan yang secara mayoritas didominasi oleh Hizbullah. Di sisi lain bahwa dengan mendorong Hariri untuk tidak mengundurkan diri dari pemerintahan Lebanon tentunya membuat Arab Saudi setidaknya dapat membendung pengaruh politik Hizbullah bersama dengan Amerika Serikat dan pemimpin negara Arab lainnya (Bazzi M. , 2017). Artinya usaha tersebut merupakan rencana yang disusun oleh Arab Saudi untuk membangun dukungan dengan Amerika Serikat.

Untuk itu dengan membendung pengaruh kelompok Hizbullah dalam pemerintahan Lebanon juga dapat dipahami sebagai upaya untuk meminimalisir rival utama Arab Saudi yaitu Iran dalam menyebarkan gagasan revolusionernya. Namun terlepas dari hal tersebut konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya di Lebanon tentunya akan semakin kompleks dan menimbulkan kerugian tersendiri, baik secara materiil dan non-materiil. Walaupun demikian, baik Arab Saudi maupun Iran secara intensif meningkatkan pengaruhnya sampai dengan meraih hasil yang optimal.

Seiring dengan berjalannya waktu, rivalitas antara Arab Saudi dengan Iran khususnya di kawasan Teluk Arab semakin meningkat hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan munculnya ketegangan yang terjadi pada negara anggota di kawasan Teluk Arab terhadap Qatar yang juga diikuti dengan adanya pemulihan hubungan antara Iran dengan Qatar pada tahun 2017 (Dudley, 2017). Di satu sisi, Qatar merupakan salah satu sekutu Arab Saudi di kawasan Teluk Arab. Di sisi lain

bahwa adanya perbaikan hubungan yang dilakukan oleh Qatar terhadap Iran menimbulkan konfrontasi yang terjadi antara negara-negara Sunni di Teluk Arab akan semakin meningkat (Sengupta, 2017).

Hal tersebut tentunya membuat Arab Saudi semakin khawatir karena akan melemahkan kekuatan Arab Saudi di kawasan Teluk Arab. Selain itu, adanya perbaikan hubungan dari kedua negara mengindikasikan bahwa adanya dukungan Qatar terhadap Iran dalam menciptakan aliansi baru yang bertujuan untuk meminimalisir pengaruh Arab Saudi di Teluk Arab. Maka dari itu, adanya ketegangan di Timur Tengah yang terjadi secara terus menerus akan membuat semakin sulit untuk menemukan solusi yang tepat.

Menindaklanjuti dari hal tersebut bahwa Iran dapat memanfaatkan krisis Qatar sebagai upaya untuk normalisasi hubungan dengan negara anggota Dewan Kerja sama Teluk (Ayoob, 2017). Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa memang Arab Saudi mendominasi hubungan bilateral dengan negara yang tergabung dalam Dewan Kerja sama Teluk. Artinya hal tersebut juga akan berimplikasi pada ketegangan yang terjadi di Suriah hingga saat ini. Dalam konteks konflik di Suriah, Qatar telah menjadi aliansi Arab Saudi dalam mendukung pemberontak Sunni. Akan tetapi dengan adanya krisis diplomatik antara Arab Saudi dengan Qatar memungkinkan akan mengurangi keterlibatan Qatar dalam mendukung pihak oposisi di Suriah.

Dengan adanya normalisasi hubungan Qatar dan Iran dalam setiap bidang tentunya akan menghasilkan suatu keuntungan bagi kedua negara. Di satu sisi rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah dapat mempengaruhi posisi kedua

negara khususnya dalam tatanan politik. Di sisi lain, terlepas dari adanya rivalitas di atas tentunya membutuhkan suatu solusi yang konstruktif dalam mendamaikan Iran dan Arab Saudi dengan menggunakan pendekatan damai.

Lebih lanjut bahwa pemerintah Iran dan Arab Saudi mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka. Untuk itu pertemuan tersebut telah direncanakan oleh Menteri Luar Negeri Iran yaitu Javad Zarif melalui delegasinya tepatnya setelah selesainya ziarah haji di Arab Saudi pada awal September 2017 (Dehghanpisheh, 2017). Adapun pertemuan tersebut mengindikasikan bahwa setidaknya ada upaya dari pemerintah Arab Saudi dan Iran untuk melakukan rekonsiliasi.

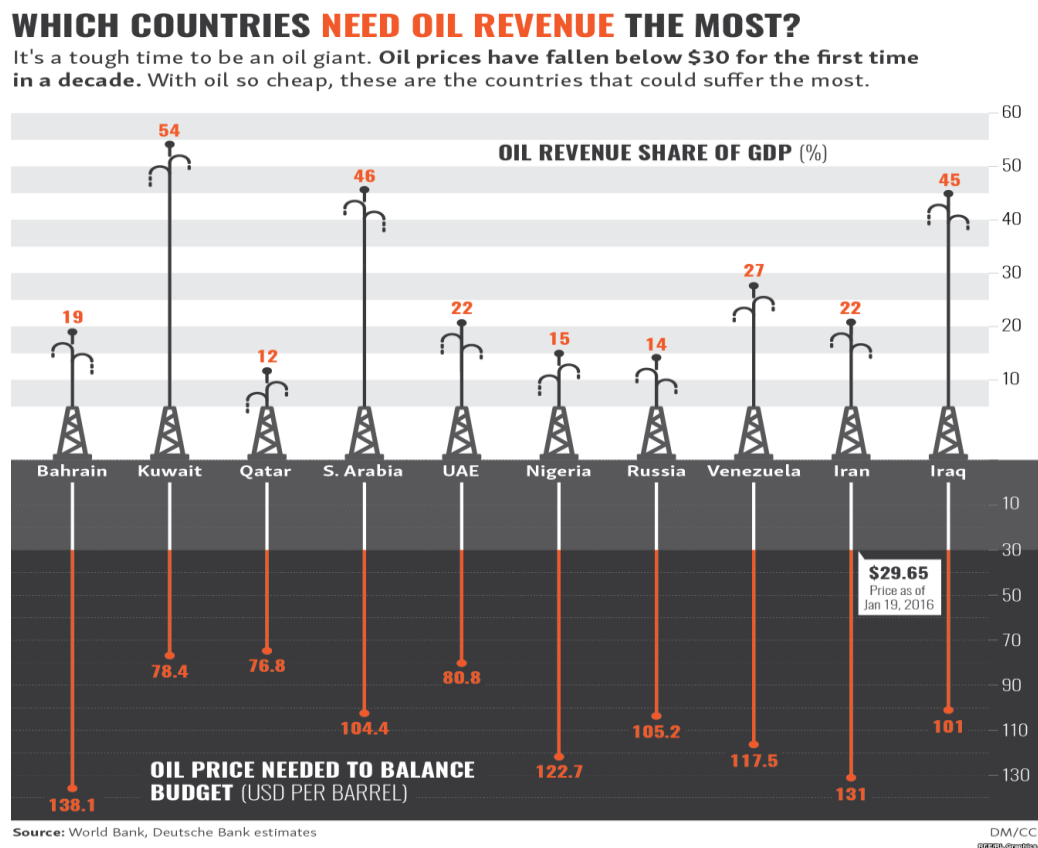
Mengingat bahwa hubungan Iran dan Arab Saudi semakin memburuk karena adanya rivalitas terhadap konflik di regional Timur Tengah (Sirgany, 2017). Di satu sisi, adanya kunjungan ini merupakan timbal balik dari adanya pemutusan hubungan diplomatik kedua negara. Di sisi lain, upaya yang dilakukan oleh Iran dan Arab Saudi merupakan tindakan yang bertujuan untuk normalisasi hubungan di Timur Tengah, sehingga usaha tersebut harus senantiasa diapresiasi oleh negara anggota di kawasan Timur Tengah.

Dengan demikian konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang terlihat semakin memanas dapat dilihat ketika adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr tahun 2016. Adanya eksekusi tersebut tentunya akan semakin memicu konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, sehingga hal tersebut tentunya harus diselesaikan sedemikian rupa. Jika tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan.

2.2 Dampak Konflik antara Iran dengan Arab Saudi

Berbicara mengenai dampak dari adanya ketegangan yang terjadi di regional Timur Tengah antara Iran dengan Arab Saudi terutama pasca otoritas Arab Saudi memutuskan untuk melakukan eksekusi mati terhadap Syekh Nimr Al-Nimr menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Dampak yang dimaksud yaitu terjadi pada stabilitas ekonomi dan politik di regional Timur Tengah. Untuk itu, salah satu pengaruhnya adalah pelemahan terhadap harga minyak bumi.

Tabel 2.1 Harga Minyak Bumi (US\$)



Tabel di atas menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi di regional Timur Tengah antara Iran dengan Arab Saudi menimbulkan dampak yang cukup signifikan yaitu pelemahan terhadap harga minyak bumi yang turun mencapai harga US\$ 30 per barel (Stafford, 2017). Di satu sisi, murahnya harga minyak bumi yang diakibatkan oleh perpecahan Iran dan Arab Saudi dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang menjadi mitra perdagangan kedua negara, seperti Amerika Serikat.

Di sisi lain, hal penting lainnya yang perlu untuk dipahami jika konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang terjadi secara berkelanjutan tidak dihentikan, maka dikhawatirkan harga minyak akan semakin turun, sehingga akan mempengaruhi pendapatan (*income*) dari kedua negara. Artinya sebagai produsen utama minyak mentah di Timur Tengah, Iran dan Arab Saudi senantiasa memfokuskan bagaimana harga minyak dapat meningkat kembali dan pasokan minyak tidak terganggu karena hal tersebut merupakan sumber pendapatan terbesar dalam meningkatkan perekonomian negaranya (Mourdoukoutas, 2017).

Hal lainnya adalah bahwa dengan adanya penurunan harga minyak dapat memberikan pengaruh terhadap pasar global terutama terhadap negara-negara anggota *OPEC*. Adapun pengaruh yang akan didapatkan yaitu adanya indikasi untuk mengurangi produksi minyak mentah karena harga yang cenderung turun seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap minyak dan terganggunya jalur pengiriman minyak dari Teluk Persia menuju Iraq sebagai produsen terbesar kedua *OPEC* disamping Arab Saudi (Reed, 2016).

Untuk itu, peneliti melihat bahwa komitmen antara Arab Saudi dengan Iran terhadap *OPEC* dikhawatirkan cenderung menurun karena ketegangan antar kedua belah pihak dan dapat memunculkan dugaan mengenai pembatasan produksi minyak untuk kedepannya (Fauzi Y. , 2017). Oleh karena itu negara anggota *OPEC* harus mampu menentukan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga akan menciptakan rasa saling percaya dan dapat meningkatkan komitmen mereka di dalam keanggotaan *OPEC*. Hal lainnya yang perlu untuk diketahui juga bahwa konflik Iran dan Arab Saudi semakin kompleks karena secara terus akan terlibat secara tidak langsung dalam konflik di Timur Tengah hingga saat ini. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi negara anggota *OPEC*.

Selain itu dampak yang akan senantiasa diterima karena keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik di Suriah dan Yaman yaitu menyebabkan kematian 10.000 warga sipil dan 5 juta jiwa yang memutuskan untuk mengungsi di Timur Tengah dan Eropa (Bazzi M. , 2017). Lebih lanjut bahwa pengungsi dari Suriah dan Yaman dalam usahanya untuk mencari suaka, baik di negara anggota Timur Tengah maupun di Eropa tentunya dapat memicu krisis politik. Sehingga berbagai pertempuran yang diikuti oleh Arab Saudi dan Iran dalam mempertahankan suatu rezim di Suriah dan Yaman akan dapat berkontribusi dalam menciptakan suatu kehancuran di Timur Tengah.

Apabila Iran dan Arab Saudi secara terus menerus mengikuti konflik di Suriah dan Yaman, maka dikhawatirkan akan semakin banyak memakan korban jiwa.

Mengingat bahwa kondisi politik dan ekonomi di Timur Tengah yang kurang stabil diharapkan kedua negara agar dapat menyelesaikan dengan sedemikian rupa. Terlepas dari hal tersebut tentunya kondisi domestik masing-masing negara juga akan menjadi penyebab mengapa Iran dan Arab Saudi terlibat dalam konflik di Iraq, Suriah dan Yaman.

Adapun dampak lainnya yang akan dirasakan oleh negara anggota di kawasan Timur Tengah terkait intervensi pemerintah Arab Saudi dan Iran dalam konflik di regional Timur Tengah yaitu dapat menghambat upaya perdamaian khususnya konflik di Suriah (Gerges, 2013). Adanya usaha dalam menyelesaikan konflik di Suriah yang dilakukan oleh Iran dan Arab Saudi tentunya mengarah pada keraguan. Hal tersebut terjadi karena kedua negara tersebut sampai saat ini menggunakan wilayah Suriah untuk menjadi salah satu negara yang mampu menguasai kawasan Teluk.

Walaupun demikian, jika Iran dan Arab Saudi memiliki iktikad baik tentunya masing-masing negara akan mendapat keuntungan. Artinya kondisi tersebut dapat dilihat sebagai alat dalam memperluas pengaruh di kawasan Teluk yang menjadi wilayah penting dalam perebutan kekuasaan. Jika dilihat dari sudut pandang geopolitik tentunya aktor negara akan melakukan perluasan wilayah untuk agar dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sumber daya.

Kemudian karena Arab Saudi dan Iran merupakan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam dan dengan adanya perseteruan antara Arab Saudi dengan Iran menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap organisasi Islam tersebut.

Dampak yang dimaksud adalah lambatnya proses perdamaian terhadap konflik di Suriah yang dibahas dalam forum OKI dan memunculkan suatu dukungan terhadap Arab Saudi untuk mengeksploitasi Iran (Ilishef, 2016). Artinya Organisasi Kerja sama Islam dikhawatirkan menjadi salah satu organisasi internasional yang tidak netral. Walaupun pada awalnya Organisasi Kerja sama Islam berusaha untuk bersikap netral dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi.

Paparan informasi di atas telah menunjukkan bahwa komitmen Organisasi Kerja sama Islam dalam usahanya untuk mengatasi suatu perselisihan terhadap negara anggotanya harus dipertanyakan. Karena semangat solidaritas Islam yang senantiasa dibangun akan sulit untuk direalisasikan dengan baik. Apalagi jika suatu rezim internasional hanya digunakan oleh salah satu negara anggota sebagai landasan politik untuk mencapai kepentingannya.

BAB III.

Upaya Arab Saudi Terhadap Organisasi Kerja sama Islam Dalam Menyelesaikan Konflik Iran dan Arab Saudi Tahun 2013-2018

3.1 Upaya Arab Saudi dalam Organisasi Kerja sama Islam

Dalam politik internasional, negara memiliki kedudukan dan posisi penting dalam menentukan keberlangsungan hidupnya. Artinya negara sebagai suatu entitas politik diberikan kedaulatan dan kekayaan sumber daya yang dimiliki dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh negara itu. Kemudian hal lainnya yang penting untuk diketahui bahwa negara juga dapat memanfaatkan posisi geografinya sebagai sarana dalam mencapai kepentingan politiknya.

Di satu sisi, suatu negara akan senantiasa membangun hubungan luar negeri dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, adanya kewenangan tertentu yang dimiliki oleh suatu negara terutama dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi internasional tentunya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam membangun kekuatan untuk menyebarluaskan pengaruhnya terhadap organisasi tersebut.

Maka dari itu, suatu negara mencoba untuk memberikan upayanya melalui keberadaan dari organisasi internasional. Oleh karena itu, berbicara mengenai upaya Arab Saudi terhadap internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam diantaranya sebagai negara pendonor terbesar yang diikuti dengan dominasinya terhadap hubungan bilateral dengan mayoritas negara anggota OKI dan kapasitasnya dalam susunan struktur organisasi (Ahmed, 2017, pp. 1-3).

3.1.1 Arab Saudi sebagai negara pendonor terbesar

Berbicara mengenai upaya Arab Saudi dalam bentuk bantuan dana dapat dilihat terutama terhadap negara anggota Organisasi Kerja sama Islam. Adapun bantuan dana tersebut dapat dibuktikan bahwa pemerintah Arab Saudi sejak tahun 1970 telah menyiapkan investasi sebesar US\$ 100 miliar yang digunakan untuk pembangunan masjid, madrasah dan lembaga budaya di berbagai negara hingga saat ini termasuk negara anggota OKI (Dorsey, 2016). Adanya bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dapat dipahami sebagai usaha untuk menunjukkan bahwa negara tersebut menginginkan negara lainnya mengikuti apa yang mereka kehendaki. Namun dalam perkembangannya bahwa Arab Saudi mencoba untuk menyebarluaskan pengaruhnya dalam bentuk ideologis atau yang dikenal dengan gagasan Wahabisme.

Maka dari itu, dengan pendekatan *soft power* dalam hal ini melalui bantuan keuangan tentunya dapat memudahkan Arab Saudi dalam menciptakan aliansi baru untuk mencapai kepentingannya khususnya di regional Timur Tengah. Kemudian identitas Arab Saudi sebagai negara yang kaya akan minyak bumi tentunya mampu menarik negara lain dalam menciptakan suatu kerja sama internasional. Selain itu, pemerintah Arab Saudi senantiasa melihat peluang tersebut sebagai upaya untuk menciptakan suatu ketergantungan terhadap negara anggota OKI, sehingga pada akhirnya Arab Saudi semakin mudah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Selanjutnya, upaya Arab Saudi lainnya yang berkaitan dengan bantuan dana terutama terhadap negara anggota OKI yaitu adanya pemberian beasiswa terhadap pelajar yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi Islam di Arab Saudi. Adapun upaya tersebut dapat dibuktikan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan beasiswa untuk 2.053 pelajar dari 130 negara dan sebagian besar beasiswa tersebut didapatkan oleh Indonesia dan Pakistan (Toumi, 2012). Untuk itu program beasiswa yang telah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dapat dilihat sebagai usaha yang sistematis dan terorganisir dalam menyebarluaskan nilai atau ideologinya khususnya di dunia Islam itu sendiri khususnya terhadap negara anggota OKI.

Selanjutnya dorongan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi melalui pendanaan dalam bentuk beasiswa dapat menciptakan suatu hasil yang cukup baik. Adapun hasil yang mampu dicapai yaitu keberhasilannya dalam mendapatkan suatu kepemimpinan dalam beberapa institusi, misalnya Ahmed Yousef Ahmed Al Draiwheeh yang merupakan warga Arab Saudi dan menjadi Presiden Universitas Islam Internasional di Pakistan (Syed, 2016, p. 60). Hal tersebut telah membuktikan bahwa pendanaan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap berbagai institusi di dunia mampu menciptakan hasil yang baik.

Maka dari itu, salah satu pencapaian yang diperoleh Arab Saudi dengan memberikan bantuan dana terhadap institusi pendidikan akan senantiasa menciptakan citra positif terhadap negara lainnya. Selain itu hingga saat ini pendanaan merupakan sarana penting untuk memperluas dominasi atau pengaruhnya, sehingga negara-

negara yang lemah secara ekonomi senantiasa rentan dengan pengaruh Arab Saudi. Kemudian strategi di atas dapat dipahami sebagai upaya untuk mempromosikan kepentingan luar negeri Arab Saudi. Untuk itu, adanya distribusi bantuan luar negeri biasanya juga didorong oleh kepentingan dalam bidang politik dan keamanan jangka pendek dari negara pendonor (Gravingholt, 2016, pp. 1-2).

Adapun pemberian bantuan dana oleh Arab Saudi juga telah didukung dengan adanya Kantor Sekretariat OKI yang berada di Arab Saudi dan *Islamic Development Bank* / Bank Pembangunan Islam yang berpusat di Jeddah. Adanya Bank Pembangunan Islam didirikan dalam rangka mendorong dan memperkuat kerja sama ekonomi terhadap negara anggota OKI serta pada tahun 2008 telah memiliki modal sebesar US\$ 2 Miliar untuk menjalankan programnya (Zuhur, 2011, p. 169). Lebih lanjut adanya sarana pendukung di atas tentunya Arab Saudi memiliki posisi penting terhadap kontrol dari lembaga tersebut. Selain itu, Arab Saudi juga telah mengalokasikan bantuan keuangan sebesar US\$ 1 Miliar ke Bank Pembangunan Islam untuk menunjang program pengentasan kemiskinan (Johnson T. , 2010).

Di satu sisi, ketergantungan yang cukup besar terhadap pendanaan Arab Saudi yang diberikan kepada negara anggota Organisasi Kerja sama Islam dipahami sebagai peluang potensial untuk membantu dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Arab Saudi.. Di sisi lain bahwa Arab Saudi senantiasa secara terus menerus meningkatkan bantuan keuangan terhadap negara sekutu Arab Saudi yang juga merupakan negara anggota OKI. Hal ini dibuktikan bahwa Arab Saudi telah

mendistribusikan bantuan keuangan hingga mencapai US\$ 22,7 Miliar yang diterima oleh Yaman, Mesir, Palestina, Yordania, Oman dan Bahrain. (Arab News, 2015).

Selain itu, pada tahun 2015 Arab Saudi bersama dengan negara Uni Emirat Arab, Kuwait dan Oman juga telah mendistribusikan bantuan dana sebesar US\$ 12,5 Miliar kepada Mesir (Al-Arabiya News, 2015). Lebih lanjut dalam kurun waktu 1985-2015 diperkirakan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menghabiskan dana sebesar US\$ 130 Miliar untuk bantuan luar negerinya (Kechichian, 2016). Alasan Arab Saudi memberikan bantuan dana kepada Mesir karena merupakan negara sekutu Arab Saudi yang juga memiliki kedekatan hubungan dengan Israel (Hannah J. , 2016). Selanjutnya, hubungan Mesir dan Israel tentunya memudahkan Arab Saudi untuk melakukan dialog secara intensif dengan Israel.

Namun, adanya kofrontasi antara Iran dengan Arab Saudi untuk saling memberikan pengaruh di Timur Tengah. Adapun ketegangan yang terjadi antara Iran dengan Arab Saudi yang terjadi hingga saat ini membuat mereka harus saling terlibat dalam *proxy war* di Iraq, Suriah, dan Yaman. Kemudian faktor lainnya yaitu adanya program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran membuat Arab Saudi harus segera bertindak sedemikian rupa. Adapun tindakan yang diambil adalah mengintensifkan hubungan bilateral yang pada akhirnya akan memberikan suara penolakan terhadap program nuklir Iran yang dipandang oleh Israel dan Arab Saudi sebagai suatu ancaman keamanan (Spencer, 2015).

Untuk itu, Arab Saudi dan Israel menganggap adanya kebangkitan Iran di Timur Tengah yang diikuti dengan intervensi Iran dalam urusan bilateral negara

lainnya merupakan sesuatu yang sifatnya lebih mendesak dibandingkan dengan isu Palestina (Hannah, 2016). Artinya Israel dan Arab Saudi mencoba untuk menekan Iran dalam menyebarluaskan pengaruhnya dengan tujuan untuk menciptakan aliansi baru. Dengan demikian, bantuan keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah Arab Saudi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki *power* untuk mempengaruhi negara lainnya atas apa yang mereka kehendaki.

Kemudian setiap negara yang menerima bantuan Arab Saudi juga mendapatkan suatu keuntungan, baik secara materiil maupun secara non-materiil. Di satu sisi, dengan kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh Arab Saudi tentunya dapat meningkatkan *bargaining position* di regional Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam. Di sisi lain bahwa dengan adanya kedudukan Arab Saudi yang penting dalam kelembangaan Organisasi Kerja sama Islam senantiasa menjadikan negara tersebut untuk memiliki posisi terdepan dalam keberlangsungan aktivitas yang dirancang dan dijalankan oleh organisasi internasional tersebut.

Maka dari itu strategi di atas dapat membuahkan hasil yang cukup positif yaitu setiap negara yang menerima bantuan Arab Saudi senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan luar negeri Arab Saudi terutama yang tergabung dalam OKI. Oleh karena itu ketergantungan Organisasi Kerja sama Islam yang cukup besar terhadap pendanaan Arab Saudi menunjukkan bahwa organisasi tersebut rentan terhadap permusuhan dengan Arab Saudi. Hal lainnya yang menarik untuk diketahui bahwasannya selain melalui dana, Arab Saudi juga senantiasa meningkatkan

eksistensinya dalam konteks dominasi terhadap susunan struktur dalam internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam.

3.1.2 Dominasi terhadap susunan struktur kelembagaan OKI

Selain dominan dalam pendanaan, upaya Arab Saudi lainnya dapat dilihat melalui dominasinya terhadap susunan struktur kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam. Hal ini dibuktikan bahwasannya Arab Saudi merupakan tempat dari Sekretariat Akademi Fiqh Islam Internasional yang didirikan tahun 1981 atas dasar kesepakatan dari negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (Ihsanoglu, 2010, p. 42). Adapun pendirian Akademi Fiqh Islam Internasional di Makkah dapat memperkuat legitimasi Arab Saudi dalam konteks pengetahuan dan yurisprudensi Islam. Untuk itu, dengan adanya institusi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu sarana penting dalam menyebarluaskan Islam versi Arab Saudi.

Pentingnya Akademi Fiqh Islam Internasional didirikan untuk mengembangkan suatu proses ijtihad secara kolektif yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang dihadapi oleh umat Islam (Samuel, 2013, p. 107). Adanya proses ijtihad yang dilakukan oleh negara anggota OKI merupakan sarana dalam menentukan dasar hukum Islam selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu, dengan adanya dukungan dari negara anggota Organisasi Kerja sama Islam tentunya dapat memperkuat eksistensi dari kepemimpinan Arab Saudi terhadap pengetahuan Islam.

Selanjutnya kantor pusat dari Organisasi Kerja sama Islam berada di Arab Saudi yang berusaha untuk mengorganisir berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh organisasi tersebut. Lebih lanjut keistimewaan yang diperoleh Arab Saudi sebagai negara tuan rumah dapat digunakan untuk memobilisasi berbagai pertemuan dalam bentuk bilateral atau multilateral terhadap negara anggota. Kemudian sarana terpenting lainnya yang didapatkan oleh Arab Saudi adalah terpilihnya Yousef Ahmed Al-Othaimeen sebagai Sekretaris Jendral OKI yang berpusat di Arab Saudi tahun 2016 (Arab News, 2016).

Di satu sisi, dengan terpilihnya orang Arab Saudi sebagai Sekretaris Jendral OKI menandakan bahwa Arab Saudi lebih menitikberatkan optimalisasi kepentingan luar negerinya tercapai dengan baik khususnya terhadap negara anggota OKI. Di sisi lain, kondisi ini dipandang Arab Saudi sebagai peluang dalam meminimalisir pengaruh Iran di regional Timur Tengah. Hal tersebut tentunya dapat mencerminkan perilaku Arab Saudi yang pada akhirnya akan menciptakan suatu konfrontasi terhadap Iran dalam internal kelembagaan OKI yang juga akan mempengaruhi tatanan politik dan sosial negara anggota OKI.

Kemudian Arab Saudi semakin meningkatkan upayanya terhadap negara Organisasi Kerja sama Islam dalam rangka membangun aliansi militer. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembentukan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFIT)* tahun 2015 atas inisiasi dari Arab Saudi dan beranggotakan 34 negara anggota OKI (Global Security Organizations, 2018). Pembentukan lembaga tersebut tentunya bertujuan untuk mengorganisir operasi militer dalam rangka memberantas aksi terorisme di Timur Tengah.

Selain itu keberadaan dari adanya lembaga internasional yang memfasilitasi kerja sama dalam bidang militer telah mendapatkan dukungan dari negara Amerika Serikat. Adanya dukungan tersebut secara spesifik tertuang dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Trump ketika melakukan kunjungan ke Arab Saudi tahun 2017 (White House, 2017). Adapun isi pernyataan tersebut yaitu :

- 1. The two leaders affirmed their determination to unite and integrate efforts between the United States-led Global Coalition Against ISIS with Saudi Arabia and the Saudi-led Islamic Military Alliance to Fight Terrorism.*
- 2. The two leaders also stressed that Iran's interference poses a threat to the security of the region and the world, and that the nuclear agreement with Iran needs to be re-examined in some of its clauses. The Iranian ballistic missile program poses a threat, not only to neighboring countries, but also a direct threat to the security of all countries in the region as well as global security.*

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasannya legitimasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dipahami sebagai usaha Arab Saudi untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah. Selain itu Arab Saudi mencoba untuk membangun kekuatan bersama dengan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam yang tergabung dalam *IMAFT* tersebut dalam meningkatkan hegemoninya di Organisasi Kerja sama Islam.

Lebih lanjut bahwa Arab Saudi mencoba untuk memberantas aksi terorisme di regional Timur Tengah yang diikuti dengan usaha untuk meminimalisir kekuatan militer Iran melalui program pengembangan nuklir. Akan tetapi upaya tersebut akan senantiasa semakin optimal jika mendapatkan suatu dukungan dari negara Amerika Serikat, sehingga pada akhirnya akan mampu menarik perhatian dari negara lainnya

untuk bergabung dengan badan militer tersebut. Di satu sisi, peluang Arab Saudi memberikan upayanya terhadap negara anggota OKI akan semakin optimal.

Di sisi lain, kondisi ini dapat berkontribusi dalam membawa negara anggota OKI ke dalam pola pemikiran Arab Saudi dalam mempromosikan definisi terorisme. Sehingga tidak mengherankan bahwa Arab Saudi mengklaim Iran sebagai negara yang mendukung aksi terorisme di Timur Tengah khususnya yang ditujukan kepada Hizbullah (Fabian, 2016). Maka dari itu munculnya *IMAFT* telah mampu memfasilitasi dalam meningkatkan eksistensi Arab Saudi untuk menarik banyak negara anggota OKI agar terlibat dalam organisasi keamanan tersebut. Lebih jauh lagi bahwa adanya *IMAFT* akan meningkatkan kepercayaan terhadap Arab Saudi.

Selanjutnya Arab Saudi terus memberikan perhatian terhadap negara anggota OKI yang tergabung dalam koalisi Arab Saudi untuk melawan aksi terorisme. Adapun perhatian yang dimaksud adalah dengan memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk pendanaan khususnya kepada Pakistan sebesar US\$ 122 juta (Rana, 2016). Di satu sisi, upaya tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap Pakistan karena ingin terlibat langsung dalam keanggotaan *IMAFT*. Di sisi lain, pemberian bantuan dana dipandang sebagai usaha Arab Saudi untuk memperkuat keberadaan militer Pakistan khususnya di kawasan Teluk Arab.

Dengan demikian, berdasarkan informasi di atas bahwa Arab Saudi mencoba untuk mengubah suatu posisi kepemimpinan dalam Organisasi Kerja sama Islam menjadi suatu upaya hegemoni melalui pendekatan *soft power* dalam hal ketergantungan dana. Adapun perubahan posisi yang awalnya kepemimpinan menjadi

hegemoni dalam suatu rezim internasional tentunya dapat menyebabkan negara lain untuk membangun suatu ketergantungan, baik secara politik maupun ekonomi. Akan tetapi dengan adanya ketergantungan dari Organisasi Kerja sama Islam terhadap bantuan keuangan Arab Saudi dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu efek terhadap netralitas OKI dalam dunia internasional terutama jika ditemukan konflik antar negara anggota OKI.

Sementara itu, posisi dan peran Arab Saudi yang dominan dalam internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam membuat negara lainnya patuh terhadap Arab Saudi. Karena dengan kedudukan secara dominan yang dimiliki oleh Arab Saudi tentunya akan menciptakan suatu kekuatan untuk melawan negara lain yang dipandang oleh Arab Saudi sebagai ancaman dalam mempertahankan eksistensi di kawasan Timur Tengah maupun Organisasi Kerja sama Islam.

Terlepas dari hal tersebut bahwa kondisi di atas dikhawatirkan dapat digunakan oleh suatu negara sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan luar negerinya, bahkan dapat menurunkan kredibilitas Organisasi Kerja sama Islam di dunia Islam. Untuk itu hal ini harus senantiasa diantisipasi dengan sedemikian rupa oleh negara anggota OKI. Adapun dalam perkembangannya pemerintah Arab Saudi mencoba untuk membentuk suatu kekuatan dalam melawan kebangkitan Iran di Timur Tengah.

Lebih lanjut, pemerintah Arab Saudi berusaha untuk mencari strategi khusus dalam rangka membangun dukungan politik terhadap negara anggota OKI. Maka dari itu, perubahan posisi Arab Saudi yang semakin dominan dalam internal kelembagaan

OKI akan memudahkan Arab Saudi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, pemerintah Arab Saudi mengajak negara anggota OKI untuk menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dengan Iran yang semakin memanas terutama pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr tahun 2016.

3.2 Organisasi Kerja sama Islam sebagai landasan politik Arab Saudi dalam meminimalisir pengaruh Iran di Timur Tengah

Adanya perseteruan yang meningkat antara Arab Saudi dengan Iran terutama keterlibatan secara tidak langsung dari kedua negara dalam konflik di Iraq, Yaman dan Suriah dengan tujuan untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah. Selain itu, kondisi di atas yang diikuti dengan adanya eksekusi mati terhadap ulama Syi'ah dalam hal ini Syekh Nimr tentunya membuat hubungan Arab Saudi dan Iran semakin memburuk. Maka dari itu, hubungan konflik Iran dan Arab Saudi yang terus berkembang hingga saat ini membutuhkan usaha yang efektif dan efisien dalam mendamaikan perseteruan antara Iran dengan Arab Saudi.

Adapun pada bab sebelumnya sudah dijelaskan adanya usaha Arab Saudi untuk melakukan rekonsiliasi hubungan dengan Iran terutama pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Pendekatan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran menggunakan cara yang bersifat damai. Kemudian, inisiasi yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi dengan tujuan untuk normalisasi hubungan antara Iran dengan Arab Saudi menunjukkan adanya iktikad baik yang pada akhirnya akan membentuk suatu perdamaian khususnya di regional Timur Tengah.

Usaha lainnya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Iran dapat menggunakan pihak ketiga atau mediator. Adanya mediator dapat berfungsi sebagai pihak yang dapat memberikan solusi terkait konflik Arab Saudi dan Iran yang terjadi hingga saat ini. Adapun dalam upayanya untuk membangun hubungan damai dengan Iran, pemerintah Arab Saudi meminta kepada Irak melalui Perdana Menteri Haider Al-Abadi untuk menjadi mediator (O'Toole, 2017). Lebih lanjut upaya tersebut direspon secara positif oleh pemerintah Iran atas dasar solidaritas Islam dan untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah.

Inisiatif lainnya yang disusun oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka menyelesaikan konflik dengan Iran melalui mekanisme organisasi internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertemuan negara anggota OKI di Jeddah untuk membahas perkembangan konflik Suriah dan penyerangan demonstrasi Iran terhadap kantor kedutaan Arab Saudi di Teheran (Fauzi G. A., 2017, pp. 1201-1204). Adanya pertemuan negara anggota OKI tersebut diusulkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah khususnya dengan Iran pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Maka dari itu, pemerintah Arab Saudi telah menentukan langkah yang positif untuk membangun hubungan damai dengan Iran.

Dalam perkembangannya, peneliti beranggapan bahwa upaya yang akan diambil oleh Arab Saudi dalam menyelesaikan konfliknya dengan Iran dapat melalui eksistensi dari Organisasi Kerja sama Islam. Lebih lanjut, peneliti akan memberikan suatu interpretasi mengenai pendekatan yang akan diambil oleh Arab Saudi melalui penggunaan teori aktor rasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa

adanya teori aktor rasional berusaha untuk mengamati fenomena dalam hubungan internasional terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh negara.

Kemudian dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh suatu negara tentunya membutuhkan berbagai preferensi dan alternatif dalam memperoleh kepentingan yang sangat menguntungkan. Adapun dalam mengetahui perilaku negara yang akan dijalankan oleh negara tersebut harus senantiasa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya karena akan berpengaruh dalam mencapai keuntungan yang maksimal (Hausken, 2016, pp. 454-459).

Melihat dari adanya upaya Arab Saudi dalam internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam terutama dalam hal pendanaan dan dominasinya terhadap susunan struktur OKI dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Lebih lanjut, keberadaan rezim internasional dalam hal ini Organisasi Kerja sama Islam yang merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB dapat menjadi batu loncatan bagi Arab Saudi dalam meningkatkan kredibilitasnya di Timur Tengah, bahkan dapat membentuk kekuatan dalam melawan musuh Arab Saudi.

Pada intinya, upaya Arab Saudi akan memunculkan suatu pandangan yang menjelaskan kepentingan Arab Saudi di dalam OKI. Untuk itu, berbicara mengenai kepentingan Arab Saudi diantaranya adalah memperbaiki harga minyak bumi yang semakin melemah hingga mencapai, melawan kebangkitan Iran yang ingin menyebarkan gagasan revolusioner Islam terhadap negara sekutu Arab Saudi, mempertahankan eksistensi rezim monarki di Timur Tengah. Adapun dalam

mencapai berbagai kepentingan tersebut membutuhkan usaha yang keras dan berkelanjutan agar memperoleh hasil yang optimal.

Selanjutnya, preferensi yang senantiasa akan diambil oleh Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran diantaranya dapat menggunakan pendekatan militer (*hard power*) atau menggunakan pendekatan damai (*soft power*). Jika dalam perkembangannya Arab Saudi memilih dengan pendekatan militer dalam hal ini melalui *proxy war* di Iraq, Yaman dan Suriah tentunya akan semakin melemahkan harga minyak bumi yang mencapai US\$ 30 per barel (Ngai, 2016).

Adapun ketergantungan Arab Saudi dari pendapatan minyak bumi sebesar 88% (Reimann, 2016). Selain itu, kerugian yang akan diterima oleh Arab Saudi adalah stabilitas politik, ekonomi dan keamanan Timur Tengah semakin terganggu. Selain itu, bahwasannya Arab Saudi menjadi negara pengimpor senjata sebesar 27% dari Amerika Serikat (Shahab, 2017, p. 8). Lebih lanjut kondisi tersebut telah membuat Arab Saudi menjadi pasar terbesar kedua dalam hal perdagangan senjata dunia dan mengalami peningkatan sebesar 275% terhadap impor senapan tahun 2006-2010 (Fleurant, 2016, p. 8). Untuk itu, Arab Saudi harus senantiasa mempertimbangkan kerugian dan keuntungan yang diperoleh negara tersebut jika menggunakan kekuatan militer.

Selanjutnya, alternatif lainnya jika Arab Saudi memilih untuk menggunakan pendekatan damai terutama dalam keanggotaannya di Organisasi Kerja sama Islam, maka akan diperoleh secara mayoritas negara Islam di seluruh dunia menganut paham Sunni sebesar 87-90% (Jawan, 2013, pp. 1-12). Hal tersebut juga termasuk di

dalamnya adalah negara anggota OKI. Selain itu, secara mayoritas negara anggota OKI sebanyak 70% terlibat dalam organisasi keamanan *IMAFT* (Ahmad, 2017, p. 9). Dengan demikian kondisi tersebut juga dapat didukung dengan adanya ketergantungan terhadap pendanaan Arab Saudi, dominasi susunan struktur dalam Organisasi Kerja sama Islam.

Maka dari itu, sebagai aktor rasional, Arab Saudi akan cenderung memilih pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik dengan Iran karena lebih banyak menghasilkan keuntungan dibandingkan kerugian berdasarkan data yang diperoleh di atas. Kemudian pendekatan damai yang akan diambil oleh Arab Saudi dinilai akan meminimalisir berbagai korban jiwa dan kerusakan berbagai bangunan yang diakibatkan adanya konflik di Suriah, Yaman dan Iraq yang juga diikuti oleh Arab Saudi dan Iran, bahkan dapat mengurangi tingkat eskalasi konflik yang terjadi di regional Timur Tengah.

Adapun peneliti juga beranggapan bahwa jika Arab Saudi lebih memilih untuk menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi Iran tentunya akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Lebih lanjut, pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya meningkatkan anggaran militer. Hal ini dibuktikan bahwa anggaran militer Arab Saudi dalam kurun waktu 2016 sebesar US\$ 47 miliar yang selanjutnya pada tahun 2017 dinaikkan menjadi US\$ 50 miliar, selain itu pada tahun 2018 anggaran lebih ditingkatkan menjadi US\$ 58 miliar (Bharwana, 2017).

Kemudian hingga saat ini Arab Saudi juga telah menjadi negara pembeli terbesar senjata khususnya di kawasan Timur Tengah yang telah menghabiskan biaya

lebih dari US\$ 80 miliar dan mengalami peningkatan sebesar 300% (DePetris, 2017). Upaya pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kekuatan militer tentunya didorong oleh adanya cadangan devisa yang besar, pendapatan dari penjualan minyak mentah dan keinginan Arab Saudi untuk mengatasi pengaruh Iran di Timur Tengah.

Namun adanya pengeluaran tersebut justru dikhawatirkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dan apabila Arab Saudi memutuskan untuk perang dengan Iran, maka pengeluaran untuk militer akan semakin besar dan cenderung merugikan Arab Saudi. Maka dari itu usaha tersebut hanya akan memperkuat pertahanan Arab Saudi di Timur Tengah jika memang sewaktu-waktu Iran melakukan agresi militer untuk menghalangi Arab Saudi. Artinya adanya anggaran yang semakin banyak dikeluarkan Arab Saudi dalam rangka meningkatkan kekuatan militer cenderung akan senantiasa menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi kondisi Timur Tengah saat ini.

Untuk itu, pemerintah Arab Saudi mencoba untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk terus mempertahankan posisinya sebagai negara yang berpengaruh dalam konstelasi politik di Timur Tengah. Lebih lanjut, tindakan yang dapat mengarahkan pada upaya Arab Saudi untuk menjadi negara adidaya tentunya harus mampu menjadikan posisinya menjadi negara hegemon terutama dalam hal ekonomi, militer, politik dan keamanan. Dengan adanya pergeseran posisi Arab Saudi yang menjadi hegemoni tentunya dapat menarik perhatian publik khususnya di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya, Arab Saudi juga telah berhasil menggunakan forum Organisasi Kerja sama Islam dalam mencapai kepentingannya yaitu membangun suatu front untuk menghentikan kebangkitan Islam Iran di regional Timur Tengah. Untuk itu, perlu kita ketahui bahwa pembentukan Organisasi Kerja sama Islam pada dasarnya sebagai organisasi internasional yang menaungi kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Lebih lanjut bahwa kapasitas Organisasi Kerja sama Islam sebagai agen resolusi konflik yang juga telah menjadi mitra PBB dalam menyelesaikan konflik khususnya yang melanda umat Islam (UN News Center , 2016).

Artinya Organisasi Kerja sama Islam telah mendapatkan suatu kepercayaan dari PBB untuk saling berkoordinasi dalam menentukan langkah untuk mendamaikan negara yang sedang berkonflik. Di satu sisi, pendirian Organisasi Kerja sama Islam berusaha untuk mengakomodir kepentingan umat Islam terutama dalam hal penyelesaian konflik. Di sisi lain, Organisasi Kerja sama Islam juga akan senantiasa menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan konflik terhadap umat Islam itu sendiri. Adapun komitmen dari Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik di dunia Islam khususnya terhadap negara anggotanya telah tertuang dalam piagamnya yaitu (OIC, 2018)

*CHAPTER XV
Peaceful Settlement of Disputes*

Article 27

The Member States, parties to any dispute, the continuance of which may be detrimental to the interests of the Islamic Ummah or may endanger the maintenance of international peace and security, shall, seek a solution by good offices, negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice. In this context good offices may include consultation with the Executive Committee and the Secretary-General.

Article 28

The Organisation may cooperate with other international and regional organisations with the objective of preserving international peace and security, and settling disputes through peaceful means.

Uraian terkait isi dari piagam OKI di atas menunjukkan bahwa organisasi Islam tersebut akan senantiasa berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap adanya perselisihan yang terjadi terhadap negara anggotanya. Adapun dalam penyelesaiannya melalui cara yang bersifat persuasif dan pendekatan damai. Untuk itu penggunaan cara damai yang dilakukan oleh OKI mengacu pada mekanisme ajaran Islam dalam mengatasi konflik.

Namun dalam perkembangannya, Organisasi Kerja sama Islam terus menghadapi berbagai tantangan yang cukup sulit untuk diselesaikan dalam hal ini yang berkaitan dengan ketegangan antara Arab Saudi dengan Iran yang terus terjadi hingga saat ini. Adapun dinamika yang dimaksud adalah bahwa Arab Saudi dan Iran yang merupakan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam telah mampu memanfaatkan suatu forum yang diselenggarakan organisasi internasional tersebut

sebagai sarana dalam menyebarluaskan pengaruh sektarian dari masing-masing negara terhadap dunia Islam (Johnson, 2010).

Artinya, baik Arab Saudi maupun Iran dapat memanfaatkan keberadaan rezim internasional tersebut untuk memfasilitasi kedua negara dalam mencapai hubungan damai. Lebih lanjut, Arab Saudi memandang Organisasi Kerja sama Islam sebagai sarana dalam mendapatkan pengaruhnya secara geopolitik dan senantiasa menegaskan kepemimpinan Arab Saudi dalam menentukan tujuan bersama terhadap organisasi tersebut (Destradi, 2008, pp. 5-7). Hal di atas telah menunjukkan bahwa pembentukan Organisasi Kerja sama Islam dapat menjadikan Arab Saudi memiliki suara terdepan di dunia Islam itu sendiri.

Di satu sisi, hal di atas juga dapat berkontribusi dalam menciptakan suatu kondisi yang rumit karena adanya konflik di Suriah, Yaman dan Iraq yang diikuti oleh Iran dan Arab Saudi. Di sisi lain, Organisasi Kerja sama Islam tidak dapat secara langsung mengintervensi dalam penyelesaian konflik tersebut karena adanya persaingan Arab Saudi dan Iran terutama yang terjadi di internal kelembagaan OKI. Artinya, Organisasi Kerja sama Islam harus senantiasa memberikan pendapatnya mengenai konflik sektarian antara Iran dengan Arab Saudi.

Untuk itu, Arab Saudi membangun kekuatan dengan mengajak negara anggota Organisasi Kerja sama Islam dalam usahanya untuk menghentikan kebangkitan Iran dan sekutunya di Timur Tengah. Kemudian Organisasi Kerja sama Islam senantiasa dimanfaatkan oleh Arab Saudi untuk membentuk pandangan yang mengarah pada dukungan Arab Saudi dalam meminimalisir kebangkitan Iran itu

sendiri. Maka dari itu, keberhasilan Arab Saudi dalam mengatasi Iran dan sekutunya di Timur Tengah dapat dilihat pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 yang diselenggarakan di Turki tahun 2016 yang menghasilkan resolusi diantaranya (United State Institute of Peace, 2016).

33. The Conference deplored Iran's interference in the internal affairs of the States of the region and other Member States including Bahrain, Yemen, Syria, and Somalia, and its continued support for terrorism.

105. The Conference condemned Hizbollah for conducting terrorist activities in Syria, Bahrain, Kuwait and Yemen and for supporting terrorist movements and groups undermining the security and stability of OIC Member States.

Adapun resolusi yang dihasilkan oleh Organisasi Kerja sama Islam ditujukan kepada negara anggotanya yaitu Iran. Selain itu, isi dari resolusi tersebut menunjukkan bahwa Iran merupakan negara yang mendukung aksi terorisme Hizbullah. Lebih lanjut bahwa negara anggota Organisasi Kerja sama Islam mengharapkan Iran tidak melakukan intervensi terhadap urusan dari negara anggota lainnya yang senantiasa akan memperumit tingkat eskalasi konflik di Suriah, Iraq dan Yaman.

Di satu sisi, adanya KTT OKI ke-13 yang diselenggarakan di Turki merupakan bentuk tindak lanjut dari adanya penyerangan yang dilakukan oleh warga Syi'ah terhadap kedutaan Arab Saudi di Teheran. Di sisi lain, Arab Saudi telah mampu menunjukkan kiprahnya dalam keanggotaan Organisasi Kerja sama Islam yang juga telah mengubah posisinya menjadi negara yang paling berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Untuk itu, Arab Saudi mencoba untuk menjadi negara

adidaya dengan cara mempengaruhi negara anggota Organisasi Kerja sama Islam agar mengikuti keinginan dari Arab Saudi.

Walaupun demikian, adanya pertemuan negara anggota OKI dalam KTT OKI ke-13 tahun 2016 yang berlangsung di Turki juga menjadi peluang potensial bagi Arab Saudi. Adapun peluang tersebut yaitu Arab Saudi berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad di Suriah yang dinilai oleh Arab Saudi sebagai sekutu Iran dan ancaman dalam menghalangi kepemimpinan Arab Saudi (Ezzat, 2016). Lebih lanjut, Arab Saudi senantiasa memanfaatkan momentum dalam pertemuan tersebut sebagai alat untuk meningkatkan dukungan terhadap Arab Saudi dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwasannya adanya suatu perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syi'ah khususnya terhadap negara anggota Organisasi Kerja sama Islam tidak dapat menjadi sumber persatuan. Kondisi tersebut juga telah berkontribusi dalam menciptakan sumber ketegangan antar negara anggota OKI karena perbedaan sektarian. Lebih lanjut, baik Arab Saudi maupun Iran yang memiliki kekayaan dalam hal minyak mentah dan kemampuan secara finansial tentunya dapat memunculkan strategi yang cukup agresif dalam mencapai kepentingannya, sehingga akan sulit untuk memisahkan tujuan politik, diplomatik dan keagamaan (Haynes, 2001, pp. 143-158).

Dengan demikian, sebagai aktor rasional, Arab Saudi senantiasa menggunakan pendekatan damai melalui eksistensi Organisasi Kerja sama Islam dalam usahanya untuk membangun hubungan damai dengan Iran terutama pasca

eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Adapun melalui pendekatan damai dan pengaruh yang dominan yaitu sebagai negara pendonor terbesar dan dominan dalam struktur kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam dapat membawa Arab Saudi memperoleh keuntungan yang maksimal dalam rangka normalisasi hubungan dengan Iran dibandingkan dengan penggunaan kekuatan militer.

BAB. IV

KESIMPULAN

Secara garis besar konflik antara Iran dengan Arab Saudi dimulai dengan adanya peristiwa Revolusi Republik Islam Iran 1979. Implikasi dari peristiwa tersebut menggambarkan bahwa Iran memiliki kekuatan terhadap masyarakat Syi'ah untuk menggulingkan kekuasaan rezim monarki di Iran. Lebih lanjut, Arab Saudi harus senantiasa melindungi rezim monarki di Timur Tengah dari penyebaran gagasan revolusioner Islam oleh Iran. Selanjutnya, peristiwa lain yang menjelaskan alasan mengapa Iran dan Arab Saudi berkonflik yaitu adanya perang Iran-Iraq tahun 1980-1988. Adapun perang tersebut membuat Arab Saudi melakukan intervensi untuk melindungi Iraq yang merupakan negara sekutunya dari kebangkitan Syi'ah di Iraq.

Di satu sisi, pemicu lainnya yang dapat berkontribusi dalam menciptakan konflik Iran dan Arab Saudi adalah adanya invasi Iraq oleh Amerika Serikat 2003 yang mampu menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein yang juga didalamnya ditemukan perang saudara Sunni dan Syi'ah. Di sisi lain, adanya penggulingan kekuasaan Saddam Hussein dilakukan oleh populasi Syi'ah di Iraq. Untuk itu, hal tersebut merupakan bukti bahwa kebangkitan Syi'ah di Timur Tengah semakin mengancam eksistensi dari Arab Saudi yang merupakan rival Iran.

Setelah adanya invansi Iraq oleh Amerika Serikat tahun 2003, pemicu lainnya yang mendorong Arab Saudi dan Iran memiliki hubungan konflik satu sama lain yaitu adanya fenomena Arab Spring tahun 2010 di Mesir, Bahrain dan Tunisia. Fenomena

tersebut memberikan gambaran mengenai aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut adanya demokrasi di kawasan Timur Tengah. Maka dari itu, hal tersebut membuat Arab Saudi harus mempertahankan kekuasaan rezim monarki khususnya Bahrain.

Selanjutnya, konflik antara Iran dengan Arab Saudi juga terlihat ketika adanya program pengembangan nuklir Iran tahun 2015. Kondisi tersebut dipandang Arab Saudi sebagai ancaman keamanan di regional Timur Tengah. Artinya Arab Saudi semakin khawatir terhadap kekuatan militer Iran terutama yang berkaitan dengan program pengembangan nuklir. Secara garis besar, konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang semakin memanas setelah adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr Al-Nimr tahun 2016 yang merupakan ulama kharismatik Syi'ah.

Adapun pada awalnya konflik antara Iran dengan Arab Saudi dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan atau sektarianisme Sunni dan Syi'ah. Dalam perkembangannya konflik Iran dan Arab Saudi yang terjadi hingga saat ini, selain dipicu oleh perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syi'ah juga dipengaruhi oleh adanya kompetisi secara geopolitik khususnya di regional Timur Tengah. Lebih lanjut, adanya persaingan secara geopolitik yang diikuti oleh Arab Saudi dan Iran dapat dilihat dalam keterlibatan kedua negara tersebut dalam *proxy war* di Suriah, Iraq dan Yaman.

Di satu sisi, ketegangan Iran dan Arab Saudi juga berkontribusi dalam menghambat proses perdamaian di Timur Tengah, sehingga menciptakan kondisi di regional Timur Tengah yang semakin rentan terhadap konflik. Di sisi lain, baik Iran

maupun Arab Saudi berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Untuk itu, konflik Iran dan Arab Saudi harus segera diselesaikan dengan sedemikian rupa dan senantiasa menggunakan cara yang sifatnya damai.

Terlepas dari hal tersebut bahwasannya Arab Saudi dan Iran akan berusaha untuk mewujudkan kepentingannya, baik melalui kekuatan ekonomi maupun pembentukan aliansi baru. Selanjutnya dalam konteks Timur Tengah, Arab Saudi merupakan negara yang kaya akan minyak mentah dan memiliki cadangan devisa yang cukup besar. Adanya kondisi tersebut dapat dimanfaatkan Arab Saudi sebagai instrumen dalam mempengaruhi negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Arab Saudi khususnya terhadap Organisasi Kerja sama Islam.

Lebih lanjut, Arab Saudi yang juga merupakan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam menginginkan organisasi tersebut secara perlahan dapat mengakomodir kepentingan Arab Saudi. Sehingga Arab Saudi merasa bahwa dalam mencapai hal tersebut membutuhkan usaha yang keras dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap Organisasi Kerja sama Islam. Secara spesifik, berbicara mengenai pengaruh Arab Saudi terutama yang berkaitan dengan Organisasi Kerja sama Islam yaitu sebagai negara pendonor terbesar dalam hal bantuan dana dan dominasinya terutama dalam struktur kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam.

Terlepas dari hal tersebut bahwa Arab Saudi mencoba untuk mempertahankan eksistensinya di dalam Organisasi Kerja sama Islam. Selanjutnya adanya pengaruh

Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam tentunya dimanfaatkan oleh Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran. Artinya bahwa Arab Saudi melihat adanya peluang potensial dalam internal kelembagaan OKI untuk membantu Arab Saudi dalam membangun hubungan damai dengan Iran. Di satu sisi, adanya inisiasi hubungan damai dari Arab Saudi yang ditujukan kepada Iran dapat dilihat sebagai usaha untuk membangun proses perdamaian di Timur Tengah. Di sisi lain, Organisasi Kerja sama Islam senantiasa memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik terhadap negara anggotanya dalam hal ini Iran dan Arab Saudi menggunakan cara yang damai.

Selanjutnya, Arab Saudi harus memastikan bahwa eksistensi Organisasi Kerja sama Islam mampu memberikan dampak yang cukup positif dalam menunjang kepemimpinan Arab Saudi di dunia Islam khususnya regional Timur Tengah. Maka dari itu dengan adanya hal tersebut dapat membuat Arab Saudi semakin menjadi negara yang berpengaruh dalam menentukan konstelasi politik, ekonomi, sosial dan keamanan di regional Timur Tengah.

Jika Arab Saudi mampu menjadikan Organisasi Kerja sama Islam sebagai mitra dalam normalisasi hubungan damai dengan Iran, maka kondisi ini dapat dijadikan langkah dalam membangun kredibilitas OKI di dalam dunia Internasional. Sebaliknya, jika Arab Saudi gagal memanfaatkan pengaruhnya dalam internal kelembagaan OKI terutama dalam mengatasi konflik, maka dikhawatirkan akan menurunkan rasa ketidakpercayaan terhadap Arab Saudi itu sendiri.

Lebih lanjut, melihat dari hubungan Iran dan Arab Saudi yang mengarah pada konflik tepatnya setelah adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr Al-Nimr pada tahun 2016 membutuhkan tindakan yang mengarah pada normalisasi hubungan damai. Adapun menurut peneliti, jika dilihat dari teori aktor rasional bahwa Arab Saudi harus menentukan preferensi yang pada akhirnya akan memperoleh hasil yang maksimal. Berbicara mengenai tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam membangun hubungan damai dengan Iran adalah menggunakan pendekatan damai yaitu melalui forum dalam internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam. Alasan yang mendasari peneliti terkait pemilihan cara yang bersifat damai oleh Arab Saudi karena cenderung akan membawa Arab Saudi memperoleh hasil yang optimal.

Selain itu, alasan lainnya adalah bahwa Arab Saudi mampu mempengaruhi Organisasi Kerja sama Islam melalui pemberian bantuan dana terhadap OKI yang diberikan kepada *Islamic Development Bank (IDB)* yang berbasis di Jeddah. Lebih lanjut, adanya pemberian dana yang juga diterima oleh negara anggota OKI mampu memberikan dampak positif terhadap Arab Saudi yaitu mampu menarik perhatian negara anggota OKI untuk terlibat dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT)*. Untuk itu, adanya kerja sama internasional antar negara OKI dalam bidang keamanan tentunya dapat menjadikan Arab Saudi semakin mudah untuk memperoleh aliansi keamanan dalam memberantas organisasi terorisme khususnya di regional Timur Tengah.

Di satu sisi, pemberian bantuan dana oleh Arab Saudi kepada negara anggota Organisasi Kerja sama Islam membuat Arab Saudi dapat sekaligus membangun

hubungan bilateral dalam bidang apapun. Di sisi lain, Arab Saudi secara mayoritas memiliki hubungan bilateral dengan negara anggota OKI dibandingkan Iran. Artinya Arab Saudi memiliki peluang untuk menciptakan suatu front untuk membendung pengaruh dari lawan Arab Saudi khususnya Iran dan sekutunya.

Selain itu, alasan lainnya yang mendorong Arab Saudi untuk meningkatkan pengaruhnya dalam Organisasi Kerja sama Islam yaitu dengan adanya Akademi Fiqh Islam Internasional yang berbasis di Jeddah. Lebih lanjut, lembaga tersebut memiliki peranan penting dalam menetapkan yurisprudensi Islam dan menyebarkan ajaran Islam versi Arab Saudi.

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa penyelesaian konflik Arab Saudi dan Iran dengan melibatkan Organisasi Kerja sama Islam cenderung memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan yang dimaksud adalah Arab Saudi ingin mengubah posisinya terhadap keberadaan Organisasi Kerja sama Islam yang pada awalnya sebagai kepemimpinan yang pada akhirnya menjadi hegemoni di dalam suatu rezim internasional. Lebih lanjut, berdasarkan temuan-temuan dalam skripsi tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi.

Pertama, mendesak kepada pemerintah Arab Saudi untuk segera mengakhiri intervensi melalui kekuatan militernya khususnya di Yaman dalam rangka untuk menghentikan dominasi Iran. *Kedua*, mendorong negara anggota Organisasi Kerja sama Islam untuk bersikap netral dalam menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dengan Iran. *Ketiga*, memberikan ruang bagi Organisasi Kerja sama Islam untuk memberikan solusi terbaik dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik Iran dan

Arab Saudi. *Keempat*, mendorong pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik dengan Iran melalui mediasi.

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya agar memberikan suatu analisis kritis terkait konflik Iran dan Arab Saudi melalui sudut pandang geopolitik. Di satu sisi, geopolitik akan memudahkan dalam memetakan wilayah yang penting untuk memfasilitasi suatu negara dalam mencapai politik luar negeri. Di sisi lain, dengan menggunakan sudut pandang geopolitik memudahkan akademisi atau peneliti yang memfokuskan pada hubungan konflik Arab Saudi dan Iran untuk memperoleh gambaran spesifik terkait keunikan suatu wilayah yang diperebutkan oleh Iran dan Arab Saudi dengan melihat dari perbedaan identitas masing-masing negara.

REFERENSI

BUKU

Allison, Graham T. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company, 1971

Allison. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company, 1971.

Boone, Mackenzie Tyler & Anthony M. *Rivalry in the Middle East : Saudi Arabia and Iran*. New York: Nova Science Publisher, 2012.

Borgotta, Edgar F. *Encyclopedia of Sociology*. New York: Macmillan Publishing Company, 1992.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Corbin, Anselm Strauss & Juliet. *Basic of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* . California: Sage Publications, 1998.

Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* . California: Sage Publications, 2003.

Destradi, Sandra. *Empire, hegemony, and leadership: developing a research framework for the study of regional powers*. Hamburg: Institute of Global and Area Studies, 2008.

Fleurant, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman & Sam Ferlo-Freeman. *Trends in international arms transfer, 2015*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2016.

Galtung, Charles Webel & Johan. *Handbook of Peace and Conflict* . New York: Routledge, 2007.

Gravingholt, Stephen Brown & Jorn. *The securitization of foreign aid*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Ihsanoglu, Ekmeleddin. *The Islamic Wolrd in the New Century : The Organization of the Islamic Conference*. London: Husrt & Company, 2010.

- Jonge, Jan De. *Rethinking Rational Choice Theory : A Companion on Rational and Moral Action* . New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Kayaoglu, Turan. *The Organization of Islamic Cooperation : Politics, Problems and Potential* . New York: Routledge, 2015.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Paul Anand, Prasanta K. Pattaniak & Clemens Puppe. *The Handbook of Rational and Social Choice* . New York: Oxford University Press, 2009.
- Rafael Witteck, Tom A.B Snijders and Victor Nee. *The Handbook of Rational Choice Social Research* . California : Stanford University, 2013.
- Samuel, Katja LH. *The OIC, the UN, and Counter-Terrorism Law-Making : Conflicting or Cooperative Legal Orders ?* UK: Hart Publishing, 2013.
- Syed, J., Edwina Pio, Tahir Kamran, Abbas Zaid. *Faith-Based Violence and Deobandi Militancy in Pakistan*. UK: Palgrave Macmillan, 2016.
- Zuhur, Sherifa. *Saudi Arabia*. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2011.

JURNAL

- Ahmad, Shahram Akbarzadeh & Zahid Shahab. "Impacts of Saudi Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC)." *International Journal of Politic, Culture and Social*, 2017: 09.
- Ahmed, Shahram Akbarzadeh & Zahid Shahab. "Impacts of Saudi Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC)." *International Journal of Politic, Cultural and Social*, 2017: 1-3.
- Al-Ahsan, Abdullah. "Conflict among Muslim Nations: Role of the OIC in Conflict Resolution." *Intellectual Discourse*, 2004: 139-140.
- Amiri, Reza Ekhtiari. "Iraqi Invasion of Kuwait as Turning Point in Iran-Saudi Relationship." *Journal of Politics and Law*, 2011: 188-189.
- Casterle, Bernadette Dierckx de. "QUAGOL: A guide for qualitative data analysis." *International Journal of Nursing Studies*, 2012: 4.
- Downs, Kevin. "A Theoretical Analysis of the Saudi-Iranian Rivalry in Bahrain." *Journal of Politics and International Studies*, 2013: 205-212.

- Fauzi, Gian Angga. "KETERLIBATAN INDONESIA DALAM PRA MEDIASI ARAB SAUDI DAN IRAN TAHUN 2016." *e-Journal Hubungan Internasional*, 2017: 1201-1204.
- Hanif, Raja Amir. "Pakistan, OIC and The Challenges of Muslim World." *Journal of Peace Studies*, 2014: 48-49.
- Hausken, Kjell. "Cost benefit analysis of war ." *International Journal of Conflict Management* , 2016: 454-459.
- Haynes, Jeff. "Transnational religious actors and international politics." *Third World Quarterly*, 2001: 143-158.
- Huwaidin, Mohamed Bin. "The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations." *Review of History and Political Science*, 2015: 73-76.
- Jawan, Saeid Naji & Jayum A. "Geopolitics of the Islam World and world leadership in the post-Cold War geopolitical developments." *Transcience*, 2013: 1-12.
- Matthiesen, Toby. "A "Saudi Spring?": The Shi'a Protest Movement in the Eastern Province 2011—2012 ." *Middle East Journal*, 2012: 628-630.
- Rehman, M. Ihsan Qadir dan M. Saifur. "Organization of Islamic Co-operation (OIC) and Prospects of Yemeni Conflict Resolution : Delusion or Plausible Reality." *Journal of Political Studies*, 2015: 373-378.
- Samuel, Katja LH. *The OIC, the UN, and Counter-Terrorism Law-Making : Conflicting or Cooperative Legal Orders ?* UK: Hart Publishing, 2013.
- Shahab, Akbarzadeh & Zahid. "Impacts of Saudi Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC)." *International Journal of Politics, Culture and Social*, 2017: 08.
- Shahryarifar, Sadra. "A Defence on the Prominence of Rational Actor Model within Foreign Policy Analysis." *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 2016: 25-26.
- Sharqieh, Ibrahim. "Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflict ?" *Peace and Conflcit Studies*, 2012: 168-169.
- Tracy Long-Sutehall, Magi Seque & Julia Addington Hall. "Secondary analysis of qualitative data: a valuable method for exploring sensitive issues with an elusive population?" *Journal of Research in Nursing*, 2011: 336.
- Zakerian, Mahdi Alikhani & Mehdi. "Study of Factors Affecting Saudi-Iranian Relations and Conflicts and Their Resulting Behavior Pattern." *Journal of Politics and Law*, 2016: 178-183.

WEBSITE

- . *OIC elects new secretary-general*. November 18, 2016. <http://www.arabnews.com/node/1011981/saudi-arabia> (accessed Februari 02, 2018).
- . *Saudi-Iraq Relations*. Maret 16, 2017. <https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-forrel-iraq.htm> (accessed Januari 23, 2018).
- . *Sejarah Panjang Perselisihan Arab Saudi dan Iran*. Januari 05, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarah-panjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran/> (accessed Januari 17, 2018).
- Adib-Moghaddam, Arshin. *The tension between Iran and Saudi Arabia has little to do with religion*. Januari 05, 2016. <http://www.independent.co.uk/voices/the-tension-between-iran-and-saudi-arabia-has-little-to-do-with-religion-a6797476.html> (accessed Januari 18, 2018).
- Al-Arabiya News. *Gulf states offer \$12.5 billion aid to Egypt*. Mei 31, 2015. <http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2015/03/13/Saudi-announces-4-billion-aid-package-to-Egypt.html> (accessed Februari 01, 2018).
- Arab News. *Egypt, Yemen are top recipients of Saudi aid*. Mei 19, 2015. <http://www.arabnews.com/news/748966> (accessed Februari 01, 2018).
- Arhab, Yahya. *Arab League labels Hezbollah a 'terrorist' group*. Maret 12, 2016. <http://www.aljazeera.com/news/2016/03/arab-league-labels-hezbollah-terrorist-group-160311173735737.html> (accessed Januari 18, 2018).
- Armandhanu, Denny. *Sanksi Iran Dicabut, Perusahaan Barat Merapat*. Januari 26, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160126114953-134-106705/sanksi-iran-dicabut-perusahaan-barat-merapat> (accessed Januari 23, 2018).
- Ayoob, Mohammed. *The Saudi-Qatar Crisis Amounts to a Big Win for Iran*. September 04, 2017. <http://nationalinterest.org/feature/the-saudi-qatar-crisis-amounts-big-win-iran-22147> (accessed Januari 24, 2018).
- Bazzi, Mohamad. *Commentary: How Saudi Arabia has overreached on Iran, Lebanon*. November 22, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-bazzi-afterislamicstate-commentary/commentary-how-saudi-arabia-has-overreached-on-iran-lebanon-idUSKBN1DL2K2> (accessed Januari 19, 2018).

- Bazzi, Mohammad. *Saudi Arabia has overreached on Iran, Lebanon*. November 24, 2017. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/11/24/commentary/world-commentary/saudi-arabia-overreached-iran-lebanon/#.WmfhSFMQ_IW (accessed Januari 24, 2018).
- Behn, Sharon. *Arab Saudi, Iran Putuskan Hubungan Diplomatik, Ketegangan di Timur Tengah Meningkat*. Januari 05, 2016. <https://www.voaindonesia.com/a/arab-saudi-iran-putusan-hubungan-diplomatik-ketegangan-di-timur-tengah-meningkat/3131593.html> (accessed Januari 16, 2018).
- Bharwana. *Saudi Arabia increases defence budget*. Desember 21, 2017. <https://defence.pk/pdf/threads/saudi-arabia-increases-defence-budget.534605/> (accessed Februari 27, 2018).
- Black, Ian. *Sunni v Shia: why the conflict is more political than religious*. April 05, 2015. <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/05/sunni-shia-why-conflict-more-political-thanreligious-sectarian-middle-east> (accessed Januari 10, 2018).
- Chulov, Martin. *Saudi Arabia cuts diplomatic ties with Iran after execution of cleric*. Januari 04, 2016. <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/03/saudi-arabia-cuts-diplomatic-ties-with-iran-after-nimr-execution> (accessed Januari 23, 2018).
- Dehghanpisheh, Babak. *Iran, Saudi Arabia to exchange diplomatic visits: Iranian foreign minister*. Agustus 23, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-saudi-iran-diplomacy/iran-saudi-arabia-to-exchange-diplomatic-visits-iranian-foreign-minister-idUSKCN1B31K8> (accessed Januari 20, 2018).
- DePetris, Daniel R. *The 5 Deadliest Weapons That Saudi Arabia Has In Its Military*. Mei 19, 2017. <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-5-deadliest-weapons-saudi-arabia-has-its-military-20752?page=2> (accessed Februari 27, 2018).
- Dorsey, James M. *Creating Frankenstein: The Impact of Saudi Export Ultra-Conservatism in South Asia*. Juli 29, 2016. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2813898 (accessed Februari 01, 2018).
- Dudley, Dominic. *How Qatar Is Being Pushed Into The Arms Of Iran By Saudi Arabia And Its Allies*. November 27, 2017. <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2017/11/27/qatar-pushed-into-arms-of-iran-by-saudi/#5542de47c4fe> (accessed Januari 24, 2018).

- Erdbrinkmay, Thomas. *Iran Bars Pilgrims From Traveling to Mecca for Hajj*. Mei 29, 2016. <https://www.nytimes.com/2016/05/30/world/middleeast/iran-saudi-arabia-mecca-hajj.html> (accessed Januari 23, 2018).
- Erickson, Amanda. *What's behind the feud between Saudi Arabia and Iran? Power*. Desember 20, 2017. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/12/20/whats-behind-the-feud-between-saudi-arabia-and-iran-power/?utm_term=.d43bd88e1017 (accessed Januari 23, 2018).
- Ezzat, Dina. *OIC summit bolsters Saudi influence at expense of rival Iran*. April 16, 2016. <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/199717/World/Region/OIC-summit-bolsters-Saudi-influence-at-expense-of-.aspx> (accessed Februari 05, 2018).
- Fabian, K. P. *The Iran-Saudi Confrontation: Who will win in the end?* Januari 06, 2016. https://idsa.in/idsacomments/the-iran-saudi-confrontation_kpfabian_060116 (accessed Februari 05, 2018).
- Fauzi, Yuliyanna. *Harga Minyak Tergelincir Konflik Arab Saudi dan Iran*. November 18, 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171108075626-85-254229/harga-minyak-tergelincir-konflik-arab-saudi-dan-iran/> (accessed Januari 19, 2018).
- Fisher, Max. *The cold war between Saudi Arabia and Iran that's tearing apart the Middle East, explained*. Januari 04, 2016. <https://www.vox.com/2016/1/4/10708682/sunni-shia-iran-saudi-arabia-war> (accessed Januari 18, 2018).
- FM. *Saudi Arabia and Iran*. Januari 04, 2016. <http://internationalrelations.org/saudi-arabia-and-iran/> (accessed Januari 18, 2018).
- Gerges, Fawaz. *Saudi Arabia and Iran must end their proxy war in Syria*. Desember 15, 2013. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/15/saudia-arabia-iran-proxy-war-syria> (accessed Januari 18, 2018).
- Global Security Organizations. *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT)*. Januari 03, 2018. <https://www.globalsecurity.org/military/world/int/ima.htm> (accessed Februari 02, 2018).
- Guzanski, Yoel. *Saudi Arabia and the Nuclear Agreement with Iran*. Juli 22, 2015. <http://www.inss.org.il/publication/saudi-arabia-and-the-nuclear-agreement-with-iran/> (accessed Januari 23, 2018).

- Hannah, John. *Foreign Policy*. Mei 16, 2016. <http://foreignpolicy.com/2016/05/16/on-middle-east-peace-do-this-not-that/> (accessed Februari 02, 2018).
- Hannah. *Saudi Arabia Strikes Back*. Agustus 26, 2016. <http://foreignpolicy.com/2016/08/16/saudi-arabia-strikes-back-3/> (accessed Februari 02, 2018).
- Ibish, Hussein. *Hariri Resignation Signals Intensified Saudi-Iranian Rivalry in Lebanon*. November 09, 2017. <http://www.agsiw.org/hariri-resignation-signals-intensified-saudi-iranian-rivalry-lebanon/> (accessed Januari 24, 2018).
- Ighani, Helia. *Managing the Saudi-Iran Rivalry*. Oktober 25, 2016. https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2016/10/Workshop_Report_CPA_Saudi_Iran_Rivalry_OR.pdf (accessed Januari 18, 2018).
- Ilishef, Ildus G. *The Iran-Saudi Arabia Conflict and its Impact on the Organization of Islamic Cooperation*. Juni 30, 2016. <https://www.wilsoncenter.org/publication/the-iran-saudi-arabia-conflict-and-its-impact-the-organization-islamic-cooperation> (accessed Januari 20, 2018).
- Johnson, Toni. *The Organization of the Islamic Conference*. Juni 29, 2010. <https://www.cfr.org/background/organization-islamic-conference> (accessed Februari 01, 2018).
- Johnson. *The Organization of the Islamic Conference*. Juni 29, 2010. <https://www.cfr.org/background/organization-islamic-conference> (accessed Februari 05, 2018).
- Kechichian, Joseph A. *Saudi foreign aid reaches new heights*. Agustus 31, 2016. <http://gulfnews.com/opinion/thinkers/saudi-foreign-aid-reaches-new-heights-1.1888699> (accessed Februari 01, 2018).
- Mourdoukoutas, Panos. *The Coming War Between Saudi Arabia And Iran Will Make American Frackers Very Rich*. Juni 25, 2017. <https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2017/06/25/the-coming-war-between-saudi-arabia-and-iran-will-make-american-frackers-very-rich/#1bc536e678da> (accessed Januari 19, 2018).
- Ngai, Catherine. *Tumbling oil trades below \$30 a barrel for first time in 12 years*. Januari 12, 2016. <https://www.reuters.com/article/us-global-oil/tumbling-oil-trades-below-30-a-barrel-for-first-time-in-12-years-idUSKCN0UQ02220160112> (accessed Februari 11, 2018).
- OIC. *OIC Charter*. Februari 05, 2018. https://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en (accessed Februari 05, 2018).

- O'Toole, Megan. *Is the time right for Saudi-Iran rapprochement?* Agustus 15, 2017. <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/time-saudi-iran-rapprochement-170815083034894.html> (accessed Februari 12, 2018).
- Patnistik, Egidius. *Mengapa Iran dan Arab Saudi Bermusuhan ?* Januari 06, 2016. <http://internasional.kompas.com/read/2016/01/06/09171261/Mengapa.Iran.dan.Arab.Saudi.Bermusuhan>. (accessed Januari 10, 2018).
- Rana, Shahbaz. *Saudis to give Pakistan \$122m in aid.* Maret 11, 2016. <https://tribune.com.pk/story/1063733/saudis-to-give-pakistan-122m-in-aid/> (accessed Februari 02, 2018).
- Reed, Stanley. *Oil Market Settles Lower, Takong Iran-Saudi Dispute in Stride.* Januari 04, 2016. <https://www.nytimes.com/2016/01/05/business/energy-environment/oil-saudi-arabia-iran.html?mtrref=undefined&gwh=0D6CC1D339E2227EBB1D03312B0D756A&gwt=pay> (accessed Januari 19, 2018).
- Reimann, Jakob. *Saudi Arabia vs. Iran: Predominance in the Middle East.* Februari 05, 2016. <https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/02/05/saudi-arabia-vs-iran-predominance-in-the-middle-east/> (accessed Februari 04, 2018).
- Samosir, Hanna Azarya. *Sejarah Panjang Perselisihan Arab Saudi dan Iran.* Januari 05, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarahpanjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran/> (accessed Januari 10, 2018).
- Sengupta, Kim. *Saudi Arabia will be infuriated by Qatar's decision to resume ties with Iran.* Agustus 24, 2017. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-qatar-iran-diplomatic-relations-resume-gulf-states-uae-bahrain-a7911016.html> (accessed Januari 24, 2018).
- Setyanti, Christina Andhika. *Jumlah Negara yang Putus Hubungan dengan Iran Semakin Banyak.* Januari 05, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105051300-120-102163/jumlah-negara-yang-putus-hubungan-dengan-iran-semakin-banyak/> (accessed Januari 16, 2018).
- Sirgany, Alireza Hajihosseini & Sarah El. *Iran, Saudi Arabia to try diplomatic exchange in apparent thaw.* Agustus 23, 2017. <http://edition.cnn.com/2017/08/23/middleeast/iran-saudi-arabia-thaw/index.html> (accessed Januari 20, 2018).

- Spencer, Richard. *Israel and Saudi Arabia present united front over Iran deal*. Juli 14, 2015. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/11739349/Israel-and-Saudi-Arabia-present-united-front-over-Iran-deal.html> (accessed Februari 02, 2018).
- Stafford, James. *A War Between Saudi Arabia And Iran Could Send Oil Prices To \$250*. Januari 15, 2017. https://www.huffingtonpost.com/james-stafford/a-war-between-saudi-arabia-and-iran-could-send-oil-prices-to-250_b_8984170.html (accessed Januari 19, 2018).
- The National UEA. *Arab countries to address UN on Tehran's missile programme*. November 20, 2017. <https://www.thenational.ae/world/mena/arab-countries-to-address-un-on-tehran-s-missile-programme-1.677211> (accessed Januari 23, 2018).
- Toumi, Habib. *Scholarship givento promote Islamic Studies*. September 10, 2012. <http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/scholarships-given-to-promote-islamic-studies-1.1072381> (accessed Februari 01, 2018).
- UN News Center . *UN and Organisation of Islamic Cooperation must cooperate on resolving conflicts, Security Council told*. November 17, 2016. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55590#.WnfTpXcQ_IV (accessed Februari 05, 2018).
- United State Institute of Peace. *Iran and Islamic Conference: Tensions at the Summit* . April 15, 2016. <http://iranprimer.usip.org/blog/2016/may/23/iran-and-islamic-conference-tensions-summit> (accessed Februari 05, 2018).
- White House. *Joint Statement Between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America*. Mei 23, 2017. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-kingdom-saudi-arabia-united-states-america/> (accessed Februari 02, 2018).